

LAKIP 2022

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang
Jl. Letjend Harun Sohar, Lr. Bambu Kuning No. 22
Palembang, Sumatera Selatan



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita ucapkan kepada Allah SWT atas perkenan-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2022 dapat diselesaikan tepat waktu.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang adalah wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Rencana Aksi Kegiatan, yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah bekerjasama dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang ini dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas.

Palembang, 20 Januari 2023

Kepala,



Emmilya Rosa, SKM, MKM.
NIP. 197305251997032001

LEMBAR REVIU PIMPINAN

LAKIP ini telah direviu oleh pejabat di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang pada tanggal 20 Januari 2023 :

Catatan:

sudah sesuai

Pengesahan:

Tanggal:



Kasubbag. Administrasi dan Umum

Heriyanto, S.T, MKM

NIP. 197505211999031002

Catatan:

LAKIP yang disusun telah diteliti dan direviu bersama Tim KKP Palembang

Pengesahan:

Tanggal:

Kepala Kantor

Emmilya Rosa, SKM, MKM.

NIP. 197305251997032001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini sebagai salah satu cara untuk melakukan evaluasi secara objektif, efisien, dan efektif terhadap kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang dalam rangka mewujudkan cegah tangkal penyakit di pintu masuk negara. Penyusunan LAKIP Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang merupakan tindak lanjut dari TAP MPR RI Nomor: XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta INPRES Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan memperhatikan Permenpan dan RB Nomor 53/2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan tersebut mewajibkan instansi pemerintah mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsi dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai bentuk tanggung jawab atas pencapaian kinerja dari setiap keuangan negara yang digunakan. Garis besar Laporan Kinerja ini memuat informasi terkait rencana kinerja sesuai dengan target Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dan capaian realisasi kinerja serta realisasi keuangan tahun 2022.

Secara keseluruhan, capaian kinerja tahun 2022 menunjukkan bahwa Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang dapat memenuhi sasaran yang telah ditetapkan dengan mengukur realisasi target indikator yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022. Jika dibandingkan dengan tahun 2021, capaian kinerja KKP Kelas II Palembang tahun 2022 menunjukkan peningkatan perentase capaian pada beberapa indikator dan secara rata-rata telah melebihi target yang telah ditetapkan. Salah satu kunci keberhasilan peningkatan capaian kinerja ini adanya komitmen yang kuat antara pimpinan dan seluruh pegawai Kantor

Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang untuk memfokuskan pemanfaatan sumber daya dan anggaran kegiatan.

Realisasi Anggaran Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp16.303.239.882** atau mencapai **94,17** persen dari alokasi anggaran sebesar **Rp17.312.666.000**.

Dari 7 Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 antara Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang dengan Direktur Jenderal P2P Kementerian Kesehatan RI, seluruh indikator telah mencapai target, dengan rincian sebagai berikut:

1. Indeks deteksi faktor risiko di bandara/Pelabuhan/PLBDN dengan realisasi capaian **0,96** dari target yang ditetapkan sebesar 0,89 sehingga persentase capaian **107,87 %**.
2. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan dengan realisasi capaian **100%** dari 97% target yang ditetapkan sehingga persentase capaian **103,09%**.
3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara dengan realisasi capaian **0,99** dari target sebesar 0,95 yang ditetapkan sehingga persentase capaian **104,21%**.
4. Nilai kinerja anggaran dengan realisasi capaian **89,14** dari target yang ditetapkan sebesar 85 sehingga persentase capaian **104,87%**.
5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dengan realisasi capaian **96,59** dari 93 target yang ditetapkan sehingga persentase capaian **103,86%**.
6. Kinerja implementasi WBK satker dengan realisasi capaian **89,81** dari **75** target yang ditetapkan sehingga persentase capaian **119,75%**.
7. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya dengan realisasi capaian **91%** dari **80%** target yang ditetapkan sehingga persentase capaian **113,79%**.

Berdasarkan analisis capaian kinerja tahun 2022 dapat dirumuskan beberapa langkah penting strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan rencana kinerja tahun 2023 yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan komitmen bersama dan bersinergi yang kuat antar segenap pegawai dalam meningkatkan kinerja dan performa Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang;
2. Memenuhi sumber daya manusia dengan berbagai kompetensi untuk menunjang kegiatan yang telah direncanakan;
3. Memenuhi sumber daya peralatan mendukung operasional kegiatan dalam menunjang kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
4. Melaksanakan pengadaan sarana dan prasana yang menunjang kegiatan.

Palembang, 20 Januari 2023

Kepala,



Emmilya Rosa, SKM, MKM.
NIP. 197305251997032001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	ii
Lembar Reviu Pimpinan	iii
Ikhtisar Eksekutif	iv
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Gambar.....	x

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Issue Strategis	4
1.3. Visi dan Misi.....	5
1.4. Kelembagaan.....	7
1.4.1. Tugas Pokok dan Fungsi.....	7
1.4.2. Struktur Organisasi	8
1.4.3. Sumber Daya Manusia.....	10
1.5. Maksud dan Tujuan.....	14
1.6. Sistematika Penulisan	16

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Kinerja.....	17
2.2. Perjanjian Kinerja	18

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pencapaian Kinerja Organisasi	20
1. Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan	21
2. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	30
3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/ PLBDN	36
4. Nilai kinerja anggaran.....	42
5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	47
6. Kinerja implementasi WBK satker.....	53

7.	Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL.....	58
3.2.	Realisasi Belanja Anggaran	61
3.2.1	Realisasi Anggaran	61
3.2.2	Realisasi Rata-Rata Pencapaian Kinerja Tahun 2022	66
3.3	Sumber Daya Sarana dan Prasarana	68
BAB IV PENUTUP		
4.1	Kesimpulan	69
4.2	Rencana Tindak Lanjut	69

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
1.1. Jenis Jabatan Fungsional KKP Palembang Tahun 2022.....	11
1.2. Jenis Jabatan Pelaksana KKP Palembang Tahun 2022.....	12
2.1 Target Kinerja KKP Kelas II Palembang.....	18
2.2 Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, dan Target Perjanjian Kinerja KKP Kelas II Palembang Tahun 2022.....	19
3.1 Perjanjian Kinerja KKP Kelas II Palembang Tahun 2022	20
3.2 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	48
3.3 Bobot Penilaian IKPA.....	49
3.4 Perhitungan Indikator IKPA.....	39
3.5 Realisasi Anggaran KKP Kelas II Palembang Tahun 2022.....	61
3.6 Alokasi Penerimaan KKP Kelas II Palembang Tahun 2022.....	62
3.7 Realisasi Penerimaan KKP Kelas II Palembang Tahun 2022.....	62
3.8 Rincian Realisasi Penerimaan KKP Kelas II Palembang Tahun 2022.....	63
3.9 Realisasi Anggaran Belanja KKP Kelas II Palembang Tahun 2022.....	63
3.10 Realisasi Anggaran Belanja KKP Kelas II Palembang Tahunan.....	65
3.11 Realisasi Belanja Barang KKP Kelas II Palembang Tahunan.....	66
3.12 Sumber Daya Sarana dan Prasarana KKP Kelas II Palembang TA 2022	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
1.1. Struktur Organisasi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang.....	9
1.2. Jumlah Pegawai KKP Palembang Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2022.....	12
1.3. Jumlah Pegawai KKP Palembang Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022.....	13
1.4. Jumlah Pegawai KKP Palembang Berdasarkan Pendidikan Tahun 2022	13
1.5. Jumlah Pegawai KKP Palembang Berdasarkan Golongan Tahun 2022.....	14
3.1 Jumlah Alat Angkut Sesuai dengan Standar Kekejarantinaan Kesehatan Tahun 2017-2022.....	25
3.2 Perbandingan Target Indikator 1 Tahun 2022 dengan Realisasi Capaian Tahun 2022	25
3.3 Perbandingan Target Indikator 1 pada RAK Tahun 2020-2024 terhadap Realisasi Capaian Tahun 2020-2022	26
3.4 Jumlah Pemeriksaan Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan Sesuai Standar Kekejarantinaan Kesehatan Tahun 2020- 2022.....	26
3.5 Perbandingan Jumlah Pemeriksaan Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan Sesuai Standar Kekejarantinaan Kesehatan antara KKP Palembang dengan KKP Panjang Tahun 2022.....	27
3.6 Faktor Risiko yang Dikendalikan pada Pemeriksaan Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan di Wilayah Kerja KKP Kelas II Palembang Tahun 2022	32
3.7 Perbandingan Target Indikator 2 Tahun 2022 dengan Realisasi Capaian Tahun 2022	35
3.8 Perbandingan Target Indikator 2 pada RAK Tahun 2020-2024 terhadap Realisasi Capaian Tahun 2020-2022	33
3.9 Perbandingan Persentase Faktor Risiko Penyakit Dipintu Masuk yang Dikendalikan pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan antara Tahun 2020 dengan Tahun 2022.....	34
3.10 Perbandingan Persentase Faktor Risiko Penyakit Dipintu Masuk yang Dikendalikan pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan antara KKP Palembang dengan KKP Panjang Tahun 2022.....	34

3.11	Perbandingan Target Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara Tahun 2022 dengan Realisasi Capaian Tahun 2022.....	39
3.12	Perbandingan Target Indikator 3 pada RAK Tahun 2020-2024 terhadap Realisasi Capaian Tahun 2020-2022	39
3.13	Perbandingan Capaian Kinerja antara KKP Palembang dengan KKP Mataram dan KKP Semarang Tahun 2022	40
3.14	Perbandingan Target Indikator Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2022 dengan Realisasi Capaian Tahun 2022	44
3.15	Perbandingan Target Indikator Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2022 dengan Target Nasional 2022.....	44
3.16	Perbandingan Target Indikator 4 pada RAK Tahun 2020-2024 terhadap Realisasi Capaian Tahun 2020-2022	45
3.17	Perbandingan Nilai Kinerja Anggaran antara Tahun 2020 dengan Tahun 2022.....	45
3.18	Perbandingan Nilai Kinerja Anggaran antara KKP Palembang KKP Mataram dan KKP Semarang Tahun 2022	46
3.19	Perbandingan Target Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 dengan Realisasi Capaian Tahun 2022	50
3.20	Perbandingan Target Indikator 5 pada RAK Tahun 2020-2024 terhadap Realisasi Capaian Tahun 2020-2022	50
3.21	Perbandingan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran antara Tahun 2020 dengan Tahun 2022.....	51
3.22	Perbandingan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran antara KKP Palembang dengan KKP Mataram dan KKP Semarang Tahun 2022.....	51
3.23	Perbandingan Target Indikator Kinerja Implementasi WBK Satuan Kerja Tahun 2022 dengan Realisasi Capaian Tahun 2022	54
3.24	Perbandingan Target Indikator 6 pada RAK Tahun 2020-2024 terhadap Realisasi Capaian Tahun 2020-2022	54
3.25	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Implementasi WBK Satuan Kerja antara Tahun 2020 dengan Tahun 2022.....	55
3.26	Perbandingan Realisasi Nilai Kinerja Implementasi WBK Satuan Kerja KKP Palembang dengan dengan KKP Mataram dan KKP Semarang Tahun 2022	55
3.27	Perbandingan Target Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya Tahun 2022 dengan Realisasi Capaian Tahun 2022	58
3.28	Perbandingan Target Indikator 7 pada RAK Tahun 2020-2024 terhadap Realisasi Capaian Tahun 2020-2022	58

3.29 Perbandingan Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya antara Tahun 2020 dengan Tahun 2022.....	59
3.30 Perbandingan Realisasi Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya KKP Palembang dengan KKP Kelas II Panjang Tahun 2022	59
3.31 Pagu Anggaran KKP Kelas II Palembang Tahun 2017 – 2022.....	61
3.32 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja KKP Kelas II Palembang Tahun Anggaran 2022	64

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita ucapkan kepada Allah SWT atas perkenan-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2021 dapat diselesaikan tepat waktu.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang adalah wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Rencana Aksi Kegiatan, yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah bekerjasama dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang ini dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas.

Palembang, 28 Januari 2022

Ke p a l a,



Emmy Rosa, SKM, MKM
NIP. 197305251997032001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini sebagai salah satu cara untuk melakukan evaluasi secara objektif, efisien, dan efektif terhadap kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang dalam rangka mewujudkan cegah tangkal penyakit di pelabuhan/ bandara/PLBDN. Penyusunan LAKIP Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang merupakan tindak lanjut dari TAP MPR RI Nomor: XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta INPRES Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan memperhatikan Permenpan dan RB Nomor 53/2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan tersebut mewajibkan instansi pemerintah mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsi dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai bentuk tanggung jawab atas pencapaian kinerja dari setiap keuangan negara yang digunakan. Garis besar Laporan Kinerja ini memuat informasi terkait rencana kinerja sesuai dengan target Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dan capaian realisasi kinerja serta realisasi keuangan tahun 2022.

Secara keseluruhan, capaian kinerja tahun 2022 menunjukkan bahwa Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang dapat memenuhi sasaran yang telah ditetapkan dengan mengukur realisasi target indikator yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022. Jika dibandingkan dengan tahun 2021, capaian kinerja KKP Kelas II Palembang tahun 2022 menunjukkan peningkatan persentase capaian pada beberapa indikator dan secara rata-rata telah melebihi target yang telah ditetapkan. Salah satu kunci keberhasilan peningkatan capaian kinerja ini adanya komitmen yang kuat antara pimpinan dan seluruh pegawai Kantor

Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang untuk memfokuskan pemanfaatan sumber daya dan anggaran kegiatan.

Realisasi Anggaran Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp16.303.239.882** atau mencapai **94,17** persen dari alokasi anggaran sebesar **Rp17.312.666.000**.

Dari 7 Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 antara Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang dengan Direktur Jenderal P2P Kementerian Kesehatan RI, seluruh indikator telah mencapai target, dengan rincian sebagai berikut:

1. Indeks deteksi faktor risiko di bandara/Pelabuhan/PLBDN dengan realisasi capaian **0,96** dari target yang ditetapkan sebesar 0,89 sehingga persentase capaian **107,87 %**.
2. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan dengan realisasi capaian **100%** dari 97% target yang ditetapkan sehingga persentase capaian **103,09%**.
3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pelabuhan/ bandara/PLBDN dengan realisasi capaian **0,99** dari target sebesar 0,95 yang ditetapkan sehingga persentase capaian **104,21%**.
4. Nilai kinerja anggaran dengan realisasi capaian **89,14** dari target yang ditetapkan sebesar 85 sehingga persentase capaian **104,87%**.
5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dengan realisasi capaian **96,59** dari 93 target yang ditetapkan sehingga persentase capaian **103,86%**.
6. Kinerja implementasi WBK satker dengan realisasi capaian **89,81** dari **75** target yang ditetapkan sehingga persentase capaian **119,75%**.
7. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya dengan realisasi capaian **91%** dari **80%** target yang ditetapkan sehingga persentase capaian **113,79%**.

Berdasarkan analisis capaian kinerja tahun 2022 dapat dirumuskan beberapa langkah penting strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan rencana kinerja tahun 2023 yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan komitmen bersama dan bersinergi yang kuat antar segenap pegawai dalam meningkatkan kinerja dan performa Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang;
2. Memenuhi sumber daya manusia dengan berbagai kompetensi untuk menunjang kegiatan yang telah direncanakan;
3. Memenuhi sumber daya peralatan mendukung operasional kegiatan dalam menunjang kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
4. Melaksanakan pengadaan sarana dan prasana yang menunjang kegiatan.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Lembar Reviu Pimpinan	iii
Ikhtisar Eksekutif	iv
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel.....	viii
Daftar Gambar.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Issue Strategis	4
1.3. Visi dan Misi.....	6
1.4. Kelembagaan.....	9
1.4.1. Tugas Pokok dan Fungsi	9
1.4.2. Struktur Organisasi	10
1.4.3. Sumber Daya Manusia.....	12
1.5. Maksud dan Tujuan	16
1.6. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Perencanaan Kinerja.....	20
2.2. Perjanjian Kinerja	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Pencapaian Kinerja Organisasi	22
1. Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan	23
2. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan.....	31

3.	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	38
4.	Nilai kinerja anggaran	43
5.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	47
6.	Kinerja implementasi WBK satker	53
7.	Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	58
3.2.	Realisasi Belanja Anggaran	67
3.2.1	Realisasi Anggaran	67
3.2.2	Realisasi Rata-Rata Pencapaian Kinerja Tahun 2022	73
3.3	Sumber Daya Sarana dan Prasarana	73

BAB IV PENUTUP

4.1	Kesimpulan	75
4.2	Rencana Tindak Lanjut	75

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
1.1. Jenis Jabatan Fungsional KKP Palembang Tahun 2022	12
1.2. Jenis Jabatan Pelaksana KKP Palembang Tahun 2022	13
2.1 Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, dan Target Perjanjian Kinerja KKP Kelas II Palembang Tahun 2022.....	20
3.1 Perjanjian Kinerja KKP Kelas II Palembang Tahun 2022	21
3.2 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	38
3.3 Bobot Penilaian IKPA	39
3.4 Perhitungan Indikator IKPA.....	39
3.5 Realisasi Anggaran KKP Kelas II Palembang Tahun 2022.....	47
3.6 Alokasi Penerimaan KKP Kelas II Palembang Tahun 2022	48
3.7 Realisasi Penerimaan KKP Kelas II Palembang Tahun 2022	48
3.8 Rincian Realisasi Penerimaan KKP Kelas II Palembang Tahun 2022.....	49
3.9 Realisasi Anggaran Belanja KKP Kelas II Palembang Tahun 2022	49
3.10 Realisasi Anggaran Belanja KKP Kelas II Palembang Tahunan	51
3.11 Realisasi Belanja Barang KKP Kelas II Palembang Tahunan	52
3.12 Sumber Daya Sarana dan Prasarana KKP Kelas II Palembang TA 2022	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
1.1. Struktur Organisasi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang	11
1.2. Jumlah Pegawai KKP Palembang Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2022	14
1.3. Jumlah Pegawai KKP Palembang Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022	15
1.4. Jumlah Pegawai KKP Palembang Berdasarkan Pendidikan Tahun 2022	15
1.5. Jumlah Pegawai KKP Palembang Berdasarkan Golongan Tahun 2022	16
3.1 Jumlah Alat Angkut Sesuai dengan Standar Kekearantinaan Kesehatan Tahun 2017-2022	27
3.2 Perbandingan Target Indikator 1 Tahun 2022 dengan Realisasi Capaian Tahun 2022	27
3.3 Perbandingan Target Indikator 1 pada RAK Tahun 2020-2024 terhadap Realisasi Capaian Tahun 2020-2022	28
3.4 Jumlah Pemeriksaan Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan Sesuai Standar Kekearantinaan Kesehatan Tahun 2020- 2022.....	28
3.5 Perbandingan Jumlah Pemeriksaan Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan Sesuai Standar Kekearantinaan Kesehatan antara KKP Palembang dengan KKP Panjang Tahun 2022.....	29
3.6 Faktor Risiko yang Dikendalikan pada Pemeriksaan Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan di Wilayah Kerja KKP Kelas II Palembang Tahun 2022	34
3.7 Perbandingan Target Indikator 2 Tahun 2022 dengan Realisasi Capaian Tahun 2022	35
3.8 Perbandingan Target Indikator 2 pada RAK Tahun 2020-2024 terhadap Realisasi Capaian Tahun 2020-2022.....	35

3.9	Perbandingan Persentase Faktor Risiko Penyakit Dipintu Masuk yang Dikendalikan pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan antara Tahun 2020 dengan Tahun 2022.....	36
3.10	Perbandingan Persentase Faktor Risiko Penyakit Dipintu Masuk yang Dikendalikan pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan antara KKP Palembang dengan KKP Panjang Tahun 2022.....	36
3.11	Perbandingan Target Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pelabuhan/ bandara/PLBDN Tahun 2022 dengan Realisasi Capaian Tahun 2022.....	41
3.12	Perbandingan Target Indikator 3 pada RAK Tahun 2020-2024 terhadap Realisasi Capaian Tahun 2020-2022.....	41
3.13	Perbandingan Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pelabuhan/ bandara/PLBDN antara Tahun 2020 dengan Tahun 2022	42
3.14	Perbandingan Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pelabuhan/ bandara/PLBDN antara Tahun 2020 dengan Tahun 2022	43
3.15	Perbandingan Target Indikator Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2022 dengan Realisasi Capaian Tahun 2022.....	47
3.16	Perbandingan Target Indikator 4 pada RAK Tahun 2020-2024 terhadap Realisasi Capaian Tahun 2020-2022.....	47
3.17	Perbandingan Capaian Nilai Kinerja Anggaran antara Tahun 2020 dengan Tahun 2022	48
3.18	Perbandingan Nilai Kinerja Anggaran antara KKP Palembang dengan KKP Panjang Tahun 2022	49
3.19	Perbandingan Target Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 dengan Realisasi Capaian Tahun 2022	53
3.20	Perbandingan Target Indikator 5 pada RAK Tahun 2020-2024 terhadap Realisasi Capaian Tahun 2020-2022.....	54
3.21	Perbandingan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran antara Tahun 2020 dengan Tahun 2022.....	55
3.22	Perbandingan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran antara KKP Palembang dengan KKP Panjang Tahun 2022.....	55
3.23	Perbandingan Target Indikator Kinerja Implementasi WBK Satuan Kerja Tahun 2022 dengan Realisasi Capaian Tahun 2022	58

3.24	Perbandingan Target Indikator 6 pada RAK Tahun 2020-2024 terhadap Realisasi Capaian Tahun 2020-2022.....	58
3.25	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Implementasi WBK Satuan Kerja antara Tahun 2020 dengan Tahun 2022.....	59
3.26	Perbandingan Realisasi Nilai Kinerja Implementasi WBK Satuan Kerja KKP Palembang dengan KKP Kelas II Panjang Tahun 2022	60
3.27	Perbandingan Target Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya Tahun 2022 dengan Realisasi Capaian Tahun 2022.....	64
3.28	Perbandingan Target Indikator 7 pada RAK Tahun 2020-2024 terhadap Realisasi Capaian Tahun 2020-2022.....	65
3.29	Perbandingan Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya antara Tahun 2020 dengan Tahun 2022.....	66
3.30	Perbandingan Realisasi Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya KKP Palembang dengan KKP Kelas II Panjang Tahun 2022	66
3.31	Pagu Anggaran KKP Kelas II Palembang Tahun 2017 – 2022	68
3.32	Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja KKP Kelas II Palembang Tahun Anggaran 2022	71

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang secara berkelanjutan dilaksanakan menuju masyarakat yang sehat, mandiri dan berkeadilan, mengingat pembangunan kesehatan pada dasarnya adalah investasi perwujudan sumber daya manusia yang memiliki ketahanan jiwa dan raga yang optimal sebagai modal dasar menuju masyarakat adil dan makmur sesuai dengan cita-cita bangsa.

Sejalan dengan era dan pentahapan pembangunan serta dinamika situasi kondisi lingkungan strategis, maka upaya dan program-program serta kegiatan pembangunan bidang kesehatan senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan kependudukan, epidemiologi, ilmu pengetahuan dan teknologi, gaya hidup serta kondisi lingkungan hidupnya. Arah pembangunan kesehatan juga semakin didorong untuk mampu mendukung upaya penguatan ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan bahkan kehidupan politik yang sangat dinamis, mengingat kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam peraturan perundangan maupun konvensi internasional. Untuk itu berbagai program telah dikembangkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan secara bertahap, baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Kementerian perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Dengan telah ditetapkannya RPJMN 2020-2024, maka Kementerian Kesehatan menyusun Renstra Tahun 2020-2024. Renstra Kementerian Kesehatan merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif memuat

program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan dan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan tahunan.

Periode tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sehingga merupakan periode pembangunan jangka menengah yang sangat penting dan strategis. Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai bidang yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Tatanan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, khususnya dalam bidang kesehatan ditandai dengan:

1. Terjaminnya keamanan kesehatan negara melalui kemampuan dalam melakukan pencegahan, deteksi, dan respon terhadap ancaman kesehatan global;
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat yang ditunjukkan dengan jangkauan bagi setiap warga negara terhadap lembaga jaminan sosial yang lebih menyeluruh;
3. Status kesehatan dan gizi masyarakat yang semakin meningkat serta proses tumbuh kembang yang optimal, yang ditandai dengan meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH) dan *Healthy Adjusted Life Expectancy* (HALE).

Analisa terhadap kondisi lingkungan yang ada saat ini, dapat teridentifikasi berbagai peluang dan ancaman yang mempengaruhi pencapaian tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Palembang. Beberapa peluang antara lain meliputi era globalisasi ekonomi, perdagangan internasional, hukum dan politik yang semakin kondusif, kemitraan dengan stakeholder dan masyarakat, berlakunya

International Health Regulation (IHR) revisi 2005 dan terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 33 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan.

Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Palembang sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berupaya untuk mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Kegiatan (RAK) 2020-2024, Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2022, dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun Anggaran 2022. Sebagai ukuran keberhasilan pencapaian sasaran kinerja tersebut, KKP Kelas II Palembang telah menetapkan 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam melaksanakan misi mencapai visi atau tujuan, KKP Kelas II Palembang pada awal tahun 2023 ini berkewajiban untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2022 dalam mencapai sasaran kinerja yang berazaskan akuntabilitas dan berorientasi pada pencapaian kinerja.

Dalam penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 2416/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan.

1.2. *Issue Strategis*

Sejak ditetapkannya Renstra Kementerian Kesehatan pada tahun 2020, telah terjadi disrupsi besar-besaran dalam kehidupan manusia bahkan pada skala global karena adanya pandemi COVID-19. Wabah COVID-19 yang kemudian diperkirakan akan menjadi endemik, memaksa pemerintah di seluruh dunia untuk menyesuaikan kebijakan sekaligus membangun konsep untuk perubahan cara hidup masyarakat. Salah satu sektor yang terkait langsung dengan pandemi ini adalah sektor kesehatan.

Pandemi COVID-19 telah menyadarkan seluruh pemangku kepentingan kesehatan bahwa kesehatan merupakan isu prioritas dan menekankan pentingnya ketahanan (resiliensi) sistem kesehatan, perlunya peningkatan kapasitas dan ketahanan sistem kesehatan Dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit. Presiden Republik Indonesia memberikan arahan kepada Kementerian Kesehatan tentang tiga hal, yaitu:

- a. Percepatan pelaksanaan vaksinasi untuk mewujudkan *herd immunity*;
- b. Penanganan pandemi secara lebih baik dan berkelanjutan; dan
- c. Transformasi sektor kesehatan.

Kantor Kesehatan Pelabuhan yang memiliki tugas dan fungsi mencegah masuk dan keluarnya penyakit karantina dan penyakit menular potensial wabah di pintu masuk negara, turut berperan aktif dalam penanganan pandemi ini.

Sejak awal pandemi di Indonesia pada 2020, Pegawai KKP Kelas II Palembang turut berperan aktif dengan membentuk Tim Gerak Cepat (TGC) yang bertugas di pelabuhan laut dan udara. Dengan dibentuknya tim ini tugas dan fungsi pegawai menjadi bertambah. Pegawai KKP Kelas II Palembang dijadwalkan secara bergantian melakukan skrining Covid-19, validasi dokumen penumpang perjalanan, kesehatan ABK dan crew pesawat serta memeriksa *Electronic Health Alert Card (e-HAC)*. Perubahan aturan bagi pelaku perjalanan yang sering terjadi secara cepat menyesuaikan dengan kondisi terkini covid mengakibatkan dinamika pada saat penerapan di Lapangan, pegawai KKP dituntut untuk secara cepat menyerap informasi, beradaptasi dan menjawab permasalahan yang terjadi.

Selain itu, untuk mendukung percepatan pelaksanaan vaksinasi untuk mewujudkan *herd immunity*, KKP Palembang bersinergi dengan dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dan Dinas Kesehatan Kota Palembang turut berperan aktif berpartisipasi melaksanakan vaksinasi covid dan booster baik dengan melakukan pelayanan vaksinasi covid di Pintu masuk Pelabuhan dan bandara, di kantor Induk dan pelayanan *mobile* vaksinasi. Dengan adanya pandemi Covid-19, terjadi perubahan pola kerja, secara kuantitas capaian kinerja KKP Kelas II Palembang ada yang menurun, namun secara kualitas tugas pegawai KKP Palembang semakin meningkat.

Kementerian Kesehatan menjawab tantangan Kesehatan dengan mencanangkan reformasi sistem kesehatan nasional yang diterjemahkan oleh Kementerian Kesehatan kedalam transformasi kesehatan. Perubahan Renstra Kementerian Kesehatan harus dilakukan sebagai rumusan operasional atas gagasan dan konsep transformasi tersebut.

Perubahan tersebut mencakup 6 (enam) hal prinsip atau disebut sebagai pilar transformasi kesehatan yang juga merupakan bentuk penerjemahan reformasi sistem kesehatan nasional, yaitu:

1. Transformasi Layanan Primer,
2. Transformasi Layanan Rujukan,
3. Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan,
4. Transformasi Pembiayaan Kesehatan;
5. Transformasi SDM Kesehatan; dan
6. Transformasi Teknologi Kesehatan

1.3. Visi dan Misi

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024 Visi Nasional pembangunan jangka panjang adalah terciptanya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia serta masyarakat yang makin sejahtera dalam pembangunan yang berkelanjutan didorong oleh perekonomian yang makin maju, mandiri, dan merata di seluruh wilayah didukung oleh penyediaan infrastruktur yang memadai serta makin kokohnya kesatuan dan persatuan bangsa yang dijiwai oleh karakter yang tangguh dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diselenggarakan dengan demokrasi yang

didasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta menjunjung tegaknya supremasi hukum.

Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur sesuai dengan RPJPN 2005-2025, Presiden terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024 telah menetapkan Visi Presiden 2020-2024: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”. Untuk melaksanakan visi Presiden 2020-2024 tersebut, Kementerian Kesehatan menjabarkan visi Presiden di bidang kesehatan yaitu menciptakan manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan.

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Pembangunan kesehatan mempunyai peran sentral sebagai pondasi dalam peningkatan kualitas SDM, khususnya terkait aspek pembangunan sumber daya manusia sebagai modal manusia (*human capital*). Indeks modal manusia (*Human Capital Index*) mencakup parameter:

1. *Survival*, diukur dari probabilitas keberlangsungan hidup hingga umur 5 tahun (*probability of survival to age 5*),
2. Pendidikan, diukur dari ekspektasi jumlah tahun sekolah dan skor tes terharmonisasi (*expected years of schooling dan harmonized test scores*), dan
3. Kesehatan, diukur dari *survival rate* usia 15 – 60 tahun dan proporsi anak dibawah usia 5 tahun yang tidak mengalami *stunting*.

Dalam rangka mencapai terwujudnya Visi Presiden yakni: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”, maka telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Presiden 2020-2024, yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing khususnya di bidang farmasi dan alat kesehatan, Kementerian Kesehatan telah menjabarkan misi Presiden Tahun 2020-2024, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kesehatan Reproduksi, Ibu, Anak, dan Remaja;
2. Perbaikan Gizi Masyarakat;
3. Meningkatkan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
4. Pembudayaan GERMAS;
5. Memperkuat Sistem Kesehatan.

1.4. Kelembagaan

Kantor Kesehatan Pelabuhan merupakan unit organisasi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Undang - Undang No. 1 tahun 1962 tentang Karantina Laut dan Undang - Undang No. 2 tentang Karantina Udara. Secara kelembagaan, eksistensi KKP didasarkan atas Permenkes RI Nomor: 33 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan.

1.4.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit, penyakit potensial wabah, surveilans epidemiologi, kekarantinaan, pengendalian

dampak risiko kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, pengawasan obat, makanan, kosmetika, dan alat kesehatan serta bahan adiktif (OMKABA) serta pengamanan terhadap penyakit baru, dan penyakit yang muncul kembali, bioterorisme, unsur biologi, kimia dan pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana, kegiatan, dan anggaran;
- b. pelaksanaan pengawasan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
- c. pelaksanaan pencegahan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
- d. pelaksanaan respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
- e. pelaksanaan pelayanan kesehatan pada kegawatdaruratan dan situasi khusus;
- f. pelaksanaan penindakan pelanggaran di bidang kekarantinaan kesehatan;
- g. pengelolaan data dan informasi di bidang kekarantinaan kesehatan;
- h. pelaksanaan jejaring, koordinasi, dan kerja sama di bidang kekarantinaan kesehatan;
- i. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kekarantinaan kesehatan;
- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kekarantinaan kesehatan; dan
- k. pelaksanaan urusan administrasi KKP.

1.4.2. Struktur Organisasi

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Kementerian Kesehatan. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 33 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor

Kesehatan Pelabuhan, dicantumkan bahwa Struktur Organisasi yang terdiri dari:

1. Subbagian administrasi umum;
2. Instalasi;
3. Wilayah kerja;
4. Kelompok jabatan fungsional.

Gambar 1.1.
Struktur Organisasi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang



Subbagian administrasi umum mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, dan hubungan masyarakat, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan.

Instalasi merupakan unit pelayanan nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala KKP. Ada 3 instalasi di KKP Kelas II Palembang, yaitu:

- Instalasi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi (PKSE)
- Instalasi Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah (UKLW)
- Instalasi Pengendalian Risiko Lingkungan (PRL)

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KKP dapat dibentuk Wilker KKP yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan dari Direktur Jenderal. Wilker KKP merupakan unit pelayanan nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala KKP. Wilker KKP dipimpin oleh koordinator yang dibantu tugasnya oleh pejabat fungsional.

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepala KKP sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugas ditetapkan koordinator dan/atau sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi kepala KKP masing-masing.

1.4.3. Sumber Daya Manusia

Pegawai KKP Kelas II Palembang per tanggal 31 Desember 2022 sebanyak 82 (delapan puluh) orang termasuk di wilayah kerja, yang terdiri dari 1 (satu) orang jabatan administrator, 1 (satu) Orang Jabatan Pengawas, 57 (lima puluh tujuh) orang Jabatan Fungsional (JF), dan 23 (dua puluh tiga) orang Jabatan Pelaksana (JP). Adapun yang menjadi pejabat struktural saat ini adalah:

1. Kepala Kantor : Emmilya Rosa, SKM, MKM
2. Kasubbag Administrasi Umum : Rahmadi Sularso, S.Kom, M.Kes.

57 (lima puluh tujuh) orang pegawai Jabatan Fungsional (JF), dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1. Jenis Jabatan Fungsional KKP Palembang Tahun 2022

No	Jenis Fungsional	Jumlah
1	Analisis Kepegawaian Mahir	1
2	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	1
3	Asisten Apoteker Penyelia	1
4	Asisten Apoteker Mahir	1
5	Dokter Ahli Madya	3
6	Dokter Ahli Muda	7
7	Entomolog Kesehatan Ahli Madya	1
8	Entomolog Kesehatan Ahli Muda	2
9	Entomolog Kesehatan Ahli Pertama	3
10	Epidemiolog Kesehatan Ahli Madya	2
11	Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda	6
12	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama	7
13	Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Pertama	1
14	Perawat Muda	1
15	Perawat Penyelia	4
16	Perawat Mahir	3
17	Perawat Terampil	2
18	Pranata Keuangan APBN Mahir	1
19	Pranata Komputer Ahli Pertama	1
20	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Muda	1
21	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	1
22	Pranata Laboratorium Kesehatan Mahir	2
23	Sanitarian Pertama	3
24	Sanitarian Mahir	2

23 (dua puluh tiga) orang jabatan pelaksana, terdiri dari:

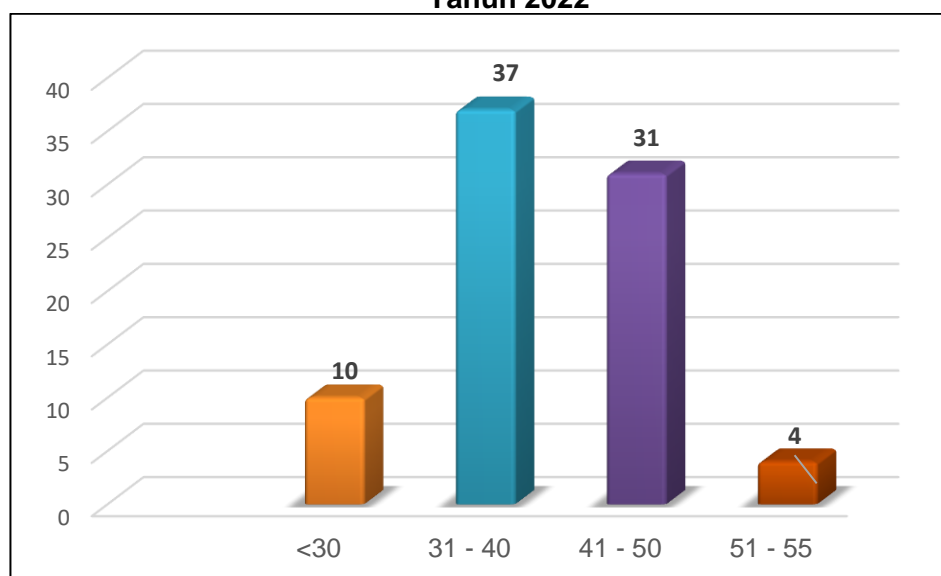
Tabel 1.2. Jenis Jabatan Pelaksana KKP Palembang Tahun 2022

No	Jenis Jabatan Pelaksana	Jumlah
1.	Analisis Keuangan	2 orang

2.	Asisten Apoteker / Pengelola Kefarmasian	2 orang
3.	Bendahara	1 orang
4.	Dokter	1 orang
5.	Entomolog Kesehatan	2 orang
6.	Entomolog Kesehatan Ahli	1 orang
7.	Epidemiolog Kesehatan Ahli	1 orang
8.	Epidemiolog Kesehatan	2 orang
9.	Pengelola Barang Milik Negara	3 orang
10.	Sanitarian	1 orang
11.	Perencana	2 orang
12.	Pranata Laboratorium Kesehatan	2 orang
13.	Sanitarian Ahli	3 orang

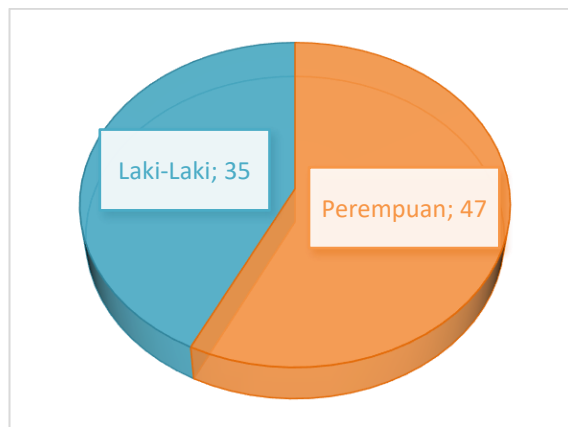
Jumlah pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang berdasarkan kelompok umur pada grafik di bawah ini dapat dilihat bahwa kelompok umur terbanyak diisi antara usia 31-40 tahun sejumlah 37 (tiga puluh tujuh) orang atau sebesar 45,12%.

Gambar 1.2.
Jumlah Pegawai KKP Palembang Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2022



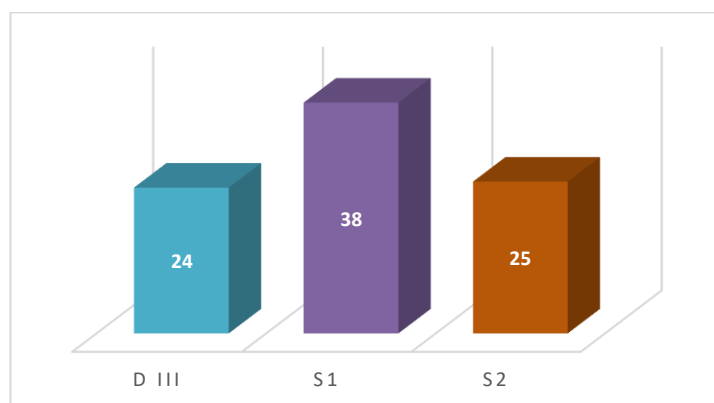
Jumlah pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang berdasarkan jenis kelamin pada grafik di bawah ini dapat dilihat bahwa komposisi terbanyak diisi oleh pegawai wanita sejumlah 47 (empat puluh tujuh) orang atau sebesar 57%.

Gambar 1.3.
Jumlah Pegawai KKP Palembang Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022



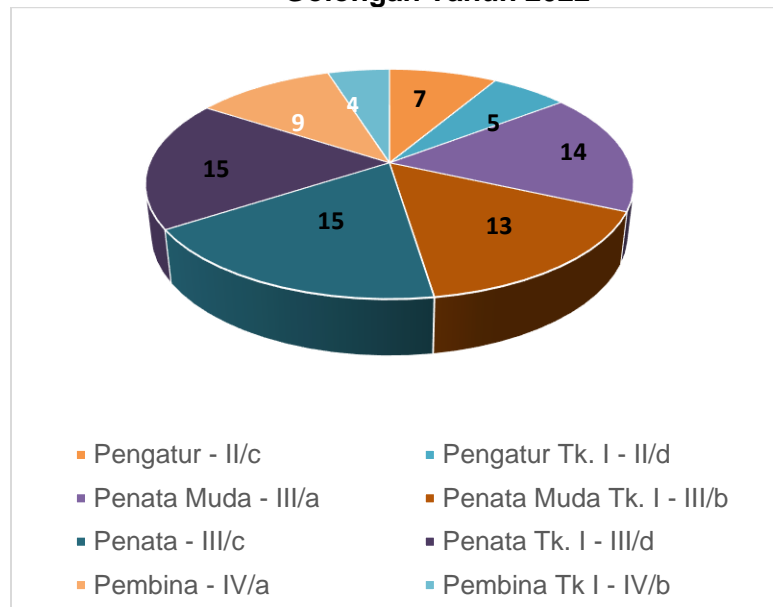
Jumlah pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang berdasarkan pendidikan pada Grafik 1.4 dapat dilihat bahwa komposisi terbanyak diisi oleh pegawai berpendidikan S1 sejumlah 38 (tiga puluh delapan) orang atau sebesar 46%, sedangkan tingkat pendidikan pegawai paling rendah

Gambar 1.4.
Jumlah Pegawai KKP Palembang Berdasarkan Pendidikan Tahun 2022



Jumlah pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang berdasarkan golongan pada grafik berikut ini dapat dilihat bahwa komposisi terbanyak diisi oleh pegawai Golongan III sejumlah 57 (lima puluh tujuh) orang atau sebesar 69,51%.

Gambar 1.5.
Jumlah Pegawai KKP Palembang Berdasarkan Golongan Tahun 2022



1.5. Maksud dan Tujuan

Tujuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Kepala KKP Kelas II Palembang secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada tahun 2022 dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan khususnya Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana telah dirumuskan dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2020-2024.

Guna mewujudkan misi presiden dalam bidang kesehatan tahun 2020-2024, Kementerian Kesehatan menetapkan 5 (lima) tujuan strategis, yaitu:

1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup;

2. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
3. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat;
4. Peningkatan sumber daya kesehatan;
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif.

Dalam rangka mencapai 5 (lima) Tujuan Strategis Kementerian Kesehatan tersebut di atas, ditetapkan 8 (delapan) Sasaran Strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat;
2. Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan;
3. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat;
4. Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan;
5. Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar;
6. Terjaminnya pembiayaan kesehatan;
7. Meningkatnya sinergisme pusat dan daerah serta meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
8. Meningkatnya efektivitas pengelolaan litbangkes dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan.

Peran Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Ditjen P2P) dalam mendukung pencapaian indikator kementerian kesehatan yaitu menyelenggarakan pencegahan dan pengendalian penyakit secara berhasil-guna dan berdaya-guna dalam mendukung pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya melalui kegiatan surveilans dan karantina kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung, pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program P2P.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang terdiri dari:

1. BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issue*) yang sedang dihadapi organisasi.

2. BAB II : Perencanaan Kinerja

Bab ini menguraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja Kementerian Kesehatan Tahun 2022.

3. BAB III : Akuntabilitas Kinerja

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Sub bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

3.2 Realisasi Anggaran

Sub bab ini menguraikan tentang realisasi anggaran yang digunakan dan telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

3.3 Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Sub bab ini menguraikan tentang sumber daya sarana dan prasarana Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang TA 2022

4. BAB IV : Penutup

Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perencanaan kinerja instansi pemerintah pada Satuan Kerja terdiri atas 3 (tiga) instrumen, yaitu : Rencana Aksi Kegiatan (RAK) yang merupakan perencanaan 5 tahunan, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Perencanaan tahunan Ditjen P2P tahun 2022 mengacu kepada dokumen Rencana Aksi Program Ditjen P2P Tahun 2020-2024, sehingga untuk Laporan Kinerja Tahun 2022 akan menggunakan indikator yang tertera pada RAP Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2020-2024.

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang mengacu pada RAP Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2020-2024 dengan indikator:

1. Indeks deteksi faktor risiko di Bandara/Pelabuhan/PLBDN
2. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara
3. Nilai kinerja anggaran
4. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
5. Kinerja implementasi WBK satker
6. Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL

Tabel 2.1.
Target Kinerja KKP Kelas II Palembang
Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan	2.347.506	701.381			
1	Indeks deteksi faktor risiko di pelabuhan/ bandara/PLBDN	-	-	0,89	0,90	0,91
2	Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	90%	95%	97%	98%	100%
	Indeks Pengendalian Faktor risiko di pintu masuk negara (cara perhitungan lama)	85%	90%			
3	Indeks Pengendalian Faktor risiko di pelabuhan/ bandara/PLBDN	-	-	0,95	0,96	0,96
4	Nilai kinerja anggaran	80	83	85	86	87
5	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran	80	93	93	95	96
6	Kinerja implementasi WBK satker	70	75	75	80	85
7	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	45%	40%	80%	82%	84%

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen kesepakatan kinerja Kepala KKP Kelas II Palembang kepada Direktur Jenderal P2P Kementerian Kesehatan RI untuk mewujudkan target-target kinerja sasaran KKP Kelas II Palembang pada tahun 2022. Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan dokumen Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2020-2024 yang setiap tahunnya dirumuskan menjadi Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan dianggarkan dalam DIPA dan RKA-KL Tahun 2022. Perjanjian Kinerja telah disusun, didokumentasikan, dan ditetapkan oleh Kepala KKP Kelas II Palembang pada Desember 2021 setelah turunnya DIPA dan RKA-KL Tahun Anggaran 2022. Selanjutnya perubahan Renstra Kemenkes dan perubahan indikator pada KKP dilakukan revisi pada tanggal 10 Agustus 2022. Target-target indikator kinerja yang ingin dicapai KKP Kelas II Palembang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.
Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, dan Target
Perjanjian Kinerja KKP Kelas II Palembang Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pelayanan Kekearifan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	Indeks deteksi faktor risiko di Bandara/Pelabuhan/PLBDN	0,89
		Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	97%
		Indeks pengendalian faktor risiko di pelabuhan/bandara/PLBDN	0,95
2	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Nilai kinerja anggaran	85
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	93
		Kinerja implementasi WBK satker	75
		Persentase ASN yang ditingkatkan Kompetensinya	80%

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pencapaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang Tahun 2022 disusun berdasarkan data pengukuran pencapaian indikator kinerja sasaran selama satu tahun anggaran. Pengukuran kinerja diperoleh melalui perhitungan persentase dari angka realisasi terhadap angka target. Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diperoleh pencapaian masing-masing indikator. Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen renstra dan penetapan kinerja.

Dalam dokumen penetapan kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang Tahun 2022 telah ditetapkan 7 (tujuh) indikator kinerja utama hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang.

Realisasi masing-masing indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1.
Perjanjian Kinerja KKP Kelas II Palembang Tahun 2022

No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks deteksi faktor risiko di bandara / pelabuhan / PLBDN	0,89	0,96	107,87%
2	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	97%	100%	103,09%
3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di	0,95	1,023	107,68

No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	pelabuhan/ bandara/PLBDN			
4	Nilai kinerja anggaran	85	89,14	104,87%
5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	93	96,59	105,14%
6	Kinerja implementasi WBK satker	75	89,81	119,75%
7	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	80%	91%	113,79 %

Pengendalian dan pengukuran diperlukan untuk memastikan bahwa pengelolaan kegiatan telah dilaksanakan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui tingkat pencapaian kinerja dan penyebab tercapai atau tidaknya target yang telah ditetapkan. Hasil analisis akan digunakan sebagai umpan balik untuk memperbaiki perencanaan strategis, operasional, dan penganggaran, serta pengendalian dan pengukuran kinerja KKP Kelas II Palembang.

Analisis pencapaian realisasi kinerja dilakukan pada setiap Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

1. Indeks deteksi faktor risiko di pelabuhan/ bandara/PLBDN

Kinerja deteksi faktor risiko di pelabuhan/ bandara/PLBDN. dihitung dari 4 parameter yakni persentase orang yang diperiksa sesuai standar, persentase alat angkut yang diperiksa sesuai standar, persentase barang yang diperiksa sesuai standar dan persentase lingkungan yang diperiksa sesuai standar

Orang yang diperiksa disini adalah penumpang pesawat, kapal, termasuk crew dan ABK, jemaah perjalanan internasional, vaksinasi, orang yang

diskrining TB serta skrining Covid-19. Awak kapal yang selanjutnya disebut ABK adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku siji. Personel pesawat udara yang selanjutnya disebut crew adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas pesawat udara oleh pemilik atau operator pesawat udara untuk melakukan tugas di atas pesawat udara.

Alat angkut adalah kapal, pesawat udara, dan kendaraan darat yang digunakan dalam melakukan perjalanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jumlah alat angkut ditetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh pejabat kekarantina.

PHQC adalah surat persetujuan berlayar karantina kesehatan atau *Port Health Quarantine Clearance* jika hasil pemeriksaan yang didapatkan telah memenuhi semua persyaratan dan dinyatakan bebas dari penyakit menular dan risiko kesehatan. CoP adalah *certificate of Pratique* yang diterbitkan untuk kapal yang datang dari luar negeri atau wilayah / pelabuhan dalam negeri terjangkau dan telah memenuhi syarat-syarat izin bebas karantina sesuai dengan SOP dan Undang-Undang yang berlaku.

Gendec (General Declaration) adalah dokumen pernyataan umum yang harus dibawa dalam penerbangan internasional yang dipergunakan untuk prosedur CIQ kedatangan dari suatu Negara yang isinya menginformasikan tentang registrasi pesawat, tanggal perjalanan, rute, nama-nama kru, lampiran *fax manifest*, *cargo manifest*, kejadian dalam penerbangan dan penanganannya, penyemprotan *desinsecticide* yang di tanda tangani oleh PIC atau FSM jika diperlukan.

Barang yang dimaksud barang pada indikator ini adalah izin angkut jenazah pada alat angkut. Yang dimaksud Lingkungan yang diperiksa pada indikator ini meliputi Tempat Pengelolaan Pangan (TPP), Air,

Inspeksi Sarana Air Bersih (ISPAB), Tempat tempat umum (TTU) dan Vektor

a. Definisi Operasional

Kinerja deteksi dini faktor risiko di pelabuhan/ bandara/PLBDN berdasarkan jumlah pemeriksaan penafisan orang, alat angkut, barang dan lingkungan yang dilakukan dalam satu tahun.

b. Cara Perhitungan

Akumulasi jumlah pemeriksaan penapisan orang, pemeriksaan alat angkut sesuai standar karantina, pemeriksaan barang dan pemeriksaan lingkungan (TTU, TPM, air dan udara)

Dihitung menggunakan rumus indeks dengan menggunakan perhitungan bobot yang dihitung berdasarkan metode USG (*Urgency, Seriousness, Growth*)

Indeks Deteksi Faktor Risiko di pintu masuk negara	Akumulasi		
	Target	Capaian	%
Baseline			
Jumlah Pemeriksaan Orang	847.932	2.739.729	323%
Jumlah Pemeriksaan Alat Angkut (COP free paratique)	10.439	29.950	287%
Jumlah Pemeriksaan Barang (jenazah)	40	69	173%
Jumlah Pemeriksaan Lingkungan	1.232	1.265	103%

No	Parameter	Bobot	Baseline	Coverage	Score	Maksimal	Cov Max	Score Max	Minimal	Score Min
1	2	3	4	5= (4/7)*100	6=3*5	7	8	9=3*8	10	11=3*10
1	Persentase orang yang diperiksa sesuai standar	5	120	120,0	600,00	100	120	600		
2	Persentase alat angkut yang diperiksa sesuai standar	5	120	120,0	600,00	100	120	600		
3	Persentase barang yang diperiksa sesuai standar	3	120	120,0	360,00	100	120	360		
4	Persentase lingkungan yang diperiksa sesuai standar	5	102,6785714	102,7	513,39	100	120	600		
	TOTAL				2.073,39			2.160,00		0

c. Capaian Indikator Kinerja

Realisasi pemeriksaan orang sesuai dengan standar kekarantinaan sepanjang tahun 2022 adalah 2.739.729 (dua juta tujuh ratus tiga puluh Sembilan ribu tujuh ratus dua puluh sembilan) orang yang terdiri dari kedatangan penumpang pesawat dan kapal dalam negeri dan luar negeri 2.349.400 orang, Jumlah kedatangan ABK dan crew dalam negeri dan luar negeri 373.936 orang, Pelaksanaan deteksi dini TB 586 orang, pemeriksaan Kesehatan penjamah makanan untuk pekerja

bandara dan Pelabuhan 68 orang, kunjungan poliklinik bukan penumpang 15 orang, pemeriksaan TB 821 orang, vaksinasi 14.903 orang.

Realisasi alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan sepanjang tahun 2022 sebanyak 29.950 sertifikat terdiri dari 17.878 sertifikat PHQC, 12.029 CoP, dan 43 sertifikat gendec.

Realisasi pemeriksaan barang (izin angkut jenazah) sebanyak 69 orang

Realisasi Pemeriksaan Lingkungan (TTU, TPM, Air, Vektor) sepanjang tahun 2022 sebanyak 1265 (Seribu dua ratus enam puluh lima) terdiri dari 514 Pemeriksaan Tempat-Tempat Umum (TTU), 319 pemeriksaan TPP, 96 Pemeriksaan ISPAB, 96 form pemeriksaan lokus dan 240 Pemeriksaan survei vektor

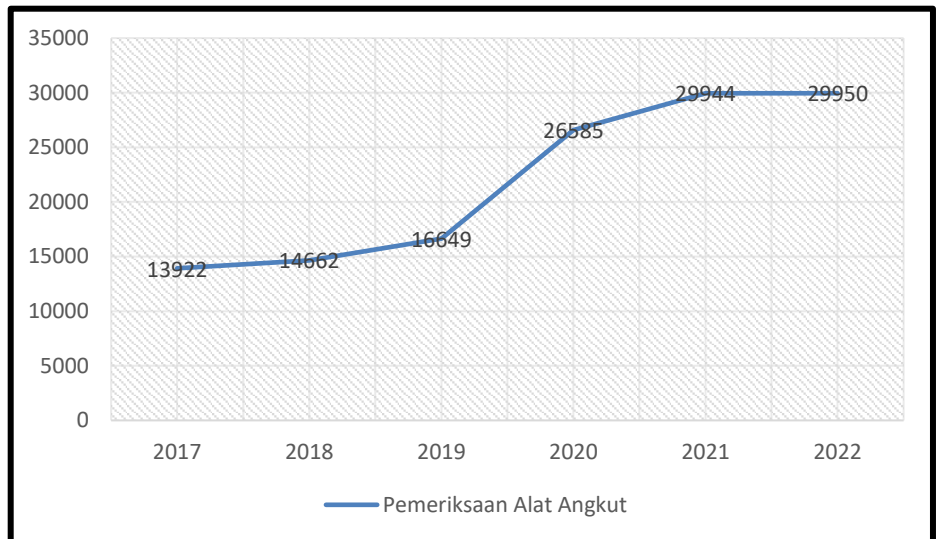
Perubahan Renstra Kemenkes, perubahan RAP ditjen P2P dan hasil audit SAKIP tahun 2021 mengharuskan KKP Palembang melakukan perubahan RAK menyelaraskan dengan perubahan dokumen tersebut, dan melakukan revisi pada beberapa Indikator termasuk Indikator satu menjadi Indeks deteksi faktor risiko di Bandara/Pelabuhan/PLBDN, Target pada revisi Indikator ini diubah menggunakan rumus angka indeks yaitu menjadi 0,89 dengan capaian sebesar 0,96 sehingga persentase capaian KKP Palembang pada indikator ini sebesar 107,87%.

Upaya pemerintah dalam penanganan Covid pada Tahun 2022 membuat angka capaian indikator ini meningkat dibandingkan pada tahun 2021, partisipasi aktif KKP dalam mempercepat vaksinasi Covid, pemeriksaan kapal dalam negeri selama Pemberlakuan PPKM yang diperketat melalui pemeriksaan CoP, dan pelaksanaan ibadah Haji dan Umroh yang tahun 2022 ini kembali dilaksanakan setelah 2 tahun

terkendala pandemi menjadi sebab meningkatnya angka pemeriksaan pada indikator ini, dapat dilihat pada grafik:

Gambar 3.1.

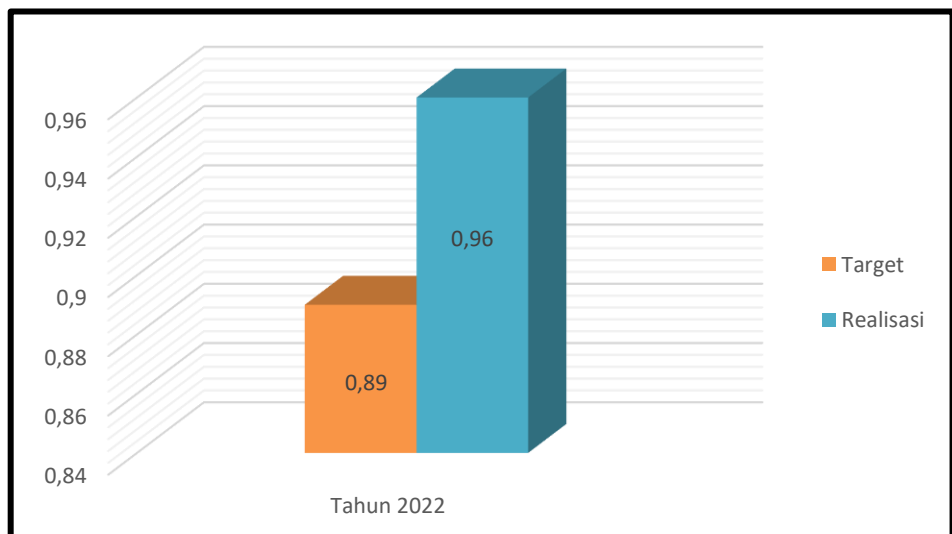
Jumlah Alat Angkut Sesuai dengan Standar Kekejarantinaan Kesehatan Tahun 2017-2022



Berdasarkan target yang ditetapkan, realisasi pada indikator ini telah mencapai melebihi target yang ditetapkan pada tahun ini. Dapat dilihat pada gambar berikut:

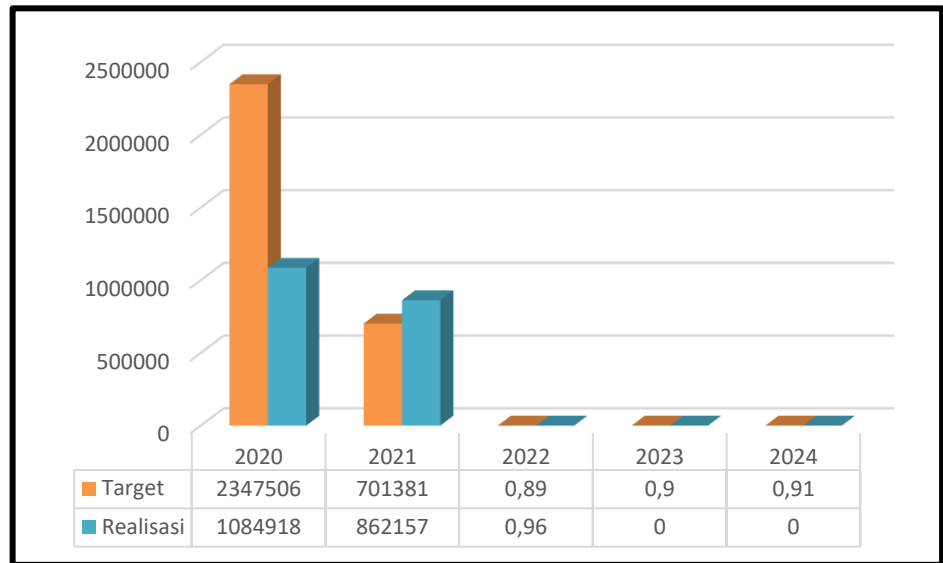
Gambar 3.2.

Perbandingan Target Indikator 1 Tahun 2022 dengan Realisasi Capaian Tahun 2022



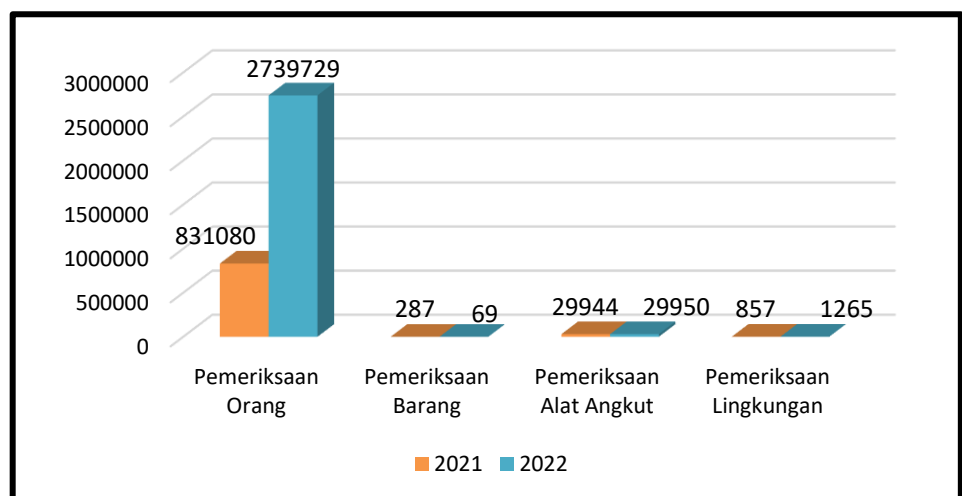
Bila dibandingkan dengan target pada RAK tahun 2020-2024, realisasi yang telah dicapai pada indikator ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 3.3.
Perbandingan Target Indikator 1 pada RAK Tahun 2020-2024 terhadap Realisasi Capaian Tahun 2020-2022



Unsur-unsur pendukung capaian pada indikator ini tahun dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

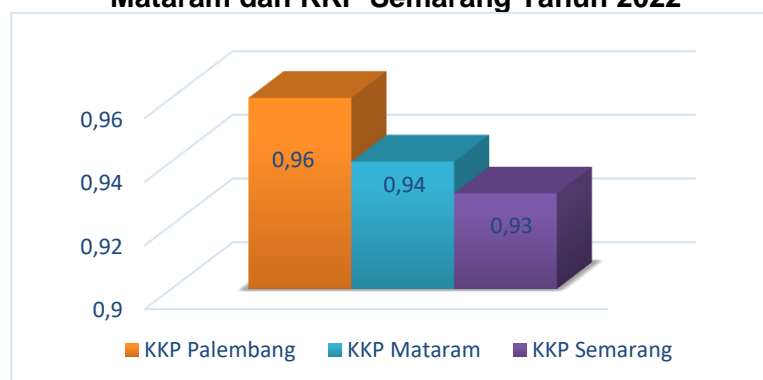
Gambar 3.4.
Jumlah Pemeriksaan Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan Sesuai Standar Kekejarantinaan Kesehatan Tahun 2020-2022



Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian pemeriksaan orang tahun 2022 lebih rendah dimana tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 sebesar 831.080 orang sedangkan pada tahun 2022 sebanyak 2.349.400 orang . perbedaan angka yang cukup signifikan disebabkan karena pada tahun 2021 pandemi covid mengakibatkan banyaknya pembatasan perjalanan, sedangkan pada tahun 2022 pemerintah mengeluarkan aturan pembatasan perjalanan dengan persyaratan tertentu, sehingga angka pelaku perjalanan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, hal lain yang mempengaruhi adalah mulai dibukanya pelaksanaan haji dan umroh oleh pemerintah Saudi. Capaian pemeriksaan alat angkut tahun 2022 juga sedikit lebih tinggi yaitu sebesar 29.950 bila dibandingkan tahun 2021 sebesar 29.944. Untuk pemeriksaan barang terdapat perubahan perhitungan, tahun 2022 yang dikategorikan sebagai barang adalah izin angkut jenazah sehingga tidak dapat diperbandingkan dengan perhitungan pemeriksaan barang pada tahun sebelumnya. Pemeriksaan lingkungan tahun 2021 sebesar 857 dan tahun 2022 mengalami kenaikan dengan capaian sebesar 1265.

Bila dibandingkan dengan KKP sekelas, capaian kinerja KKP Kelas II Palembang pada indikator ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan KKP Kelas II Mataram dengan capaian kinerja 0,94 dan KKP Kelas II Semarang 0,93 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.5.
Perbandingan Jumlah Indeks deteksi faktor risiko di bandara/Pelabuhan/PLBDN antara KKP Palembang dengan KKP Mataram dan KKP Semarang Tahun 2022



d. Analisis Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Target Kinerja

Pada tahun ini KKP Palembang berhasil mencapai target indikator ini. Upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam upaya mencapai target jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan melalui:

1. Melaksanakan deteksi dini penyakit potensial PHEIC / pandemi melalui kegiatan surveilans penyakit, surveilans faktor risiko dan jejaring kerja;
2. Melaksanakan pengawasan faktor resiko kesehatan bagi pelaku perjalanan di wilayah kerja
3. Melakukan penyelidikan epidemiologi;
4. Melakukan verifikasi rumor;
5. Melakukan pengawasan faktor resiko kesehatan bagi pelaku perjalanan di wilayah kerja;
6. Melakukan pelaksanaan jejaring kerja surveilans epidemiologi lintas sektor melalui surveilans aktif dalam rangka pengamatan epidemiologi.
7. Melakukan layanan kekarantinaan kesehatan dalam rangka penerbitan COP (*certificate of pratique*) termasuk pada kapal dalam negeri sesuai dengan Surat Edaran Kemenkes;
8. Melakukan layanan kekarantinaan kesehatan di pelabuhan penyeberangan;
9. Melakukan layanan kekarantinaan kesehatan di bandar udara;
10. Melakukan layanan kekarantinaan dalam rangka penerbitan PHQC (*Port Health Quarantine Clearance*);

e. Masalah yang Dihadapi

Kendala yang dihadapi selama tahun 2022 terjadi dikarenakan situasi Pandemi yang belum berakhir membuat Pemerintah melalui Satgas Covid beberapa kali mengeluarkan aturan mengenai pembatasan perjalanan yang menimbulkan dinamika di Lapangan.

f. Upaya Pemecahan Masalah

1. Meningkatkan pengawasan terhadap seluruh pelaku perjalanan yang akan masuk/keluar;
2. Meningkatkan kewaspadaan di pelabuhan/ bandara/PLBDN;
3. Sering melakukan sosialisasi terhadap pelaku perjalanan mengenai syarat perjalanan di masa pandemi, bisa dengan broadcast, status WA, atau postingan di media sosial lain yang dapat di lihat oleh masyarakat;
4. Mengikuti perkembangan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah agar tidak terjadi salah komunikasi di lapangan / saat bekerja;
5. Sering melakukan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor untuk meningkatkan pengawasan di pelabuhan/ bandara/PLBDN;
6. Mengaktifkan Tim Gerak Cepat (TGC) untuk membantu pelaksanaan tugas di wilayah kerja yang membutuhkan pengawasan tinggi seperti di pelabuhan dan bandara.

g. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Capaian indikator pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan sebesar 0,96 dengan target pada perjanjian kinerja sebesar 0,89 bila dibandingkan antara pencapaian KKP Palembang dengan target, persentase capaian pada indikator ini sebesar 107,87 dicapai dengan anggaran sebesar 98% sehingga pelaksanaan indikator ini efisien dengan nilai efisiensi sebesar 56%. Hasil pencapaian indikator ini didukung sumber daya manusia maupun sumber daya peralatan serta anggaran DIPA Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang Tahun Anggaran 2022. Sumber daya tersebut diberdayakan dengan mengedepankan prinsip efektif dan efisien dalam setiap tahapan kegiatan sehingga penerbitan sertifikat tepat waktu.

2. Persentase Faktor Risiko Penyakit Dipintu Masuk yang Dikendalikan pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan

Faktor risiko penyakit adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan peningkatan terjadinya suatu penyakit atau suatu kondisi, sifat, fisik atau perilaku yang dapat meningkatkan kejadian penyakit pada orang sehat.

Orang yang diperiksa disini adalah penumpang pesawat, kapal, termasuk crew dan ABK, jemaah perjalanan internasional, vaksinasi, orang yang diskriminasi TB serta skrining Covid-19. Awak kapal yang selanjutnya disebut ABK adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijiil. Personel pesawat udara yang selanjutnya disebut crew adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas pesawat udara oleh pemilik atau operator pesawat udara untuk melakukan tugas di atas pesawat udara.

Alat angkut adalah kapal, pesawat udara, dan kendaraan darat yang digunakan dalam melakukan perjalanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jumlah alat angkut ditetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh pejabat kekarantinaan.

Pemeriksaan Barang disini adalah Jumlah penerbitan izin angkut jenazah penyakit menulardan potensial wabah.

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Sanitasi adalah suatu usaha yang mengawasi beberapa faktor lingkungan fisik yang berpengaruh kepada manusia terutama terhadap hal-hal yang mempengaruhi efek, merusak perkembangan fisik, kesehatan dan kelangsungan hidup.

a. Definisi Operasional

Faktor risiko yang dikendalikan berdasarkan temuan pada pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan dalam satu tahun.

b. Cara Perhitungan

Jumlah faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan dibagi dengan jumlah faktor risiko yang ditemukan pada pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan dikali 100%

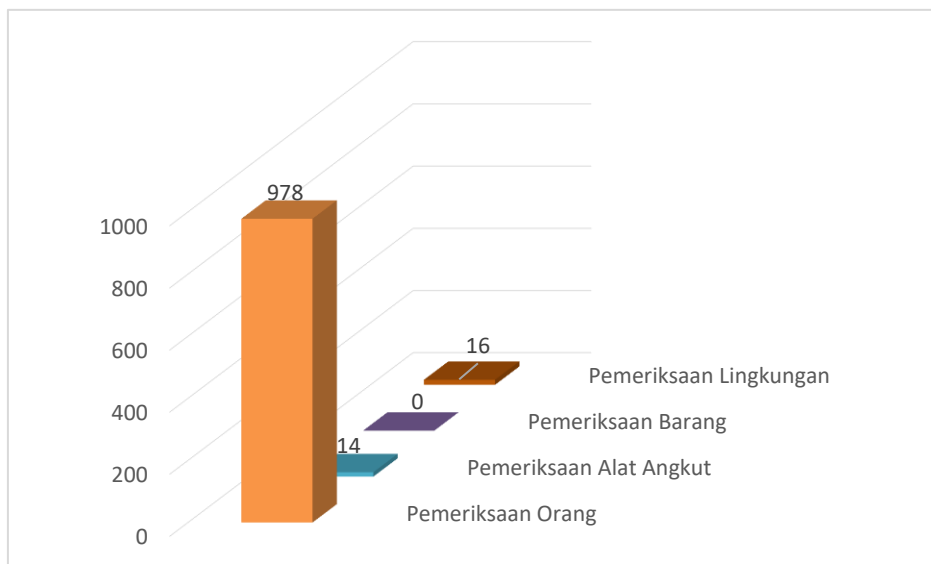
$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah faktor risiko yang ditemukan}}{\text{Jumlah faktor risiko yang dikendalikan}} \times 100\% \\ &= \frac{1008}{1008} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

c. Capaian Indikator Kinerja

Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan telah mencapai target yaitu 100% dengan target pencapaian kinerja sebesar 97%. Faktor risiko pada pemeriksaan orang yang dikendalikan 100%, faktor risiko pada pemeriksaan alat angkut yang dikendalikan 100% dan faktor risiko pada lingkungan yang dikendalikan juga 100%. Namun pada pemeriksaan barang tidak ditemukan adanya faktor risiko yang harus dikendalikan.

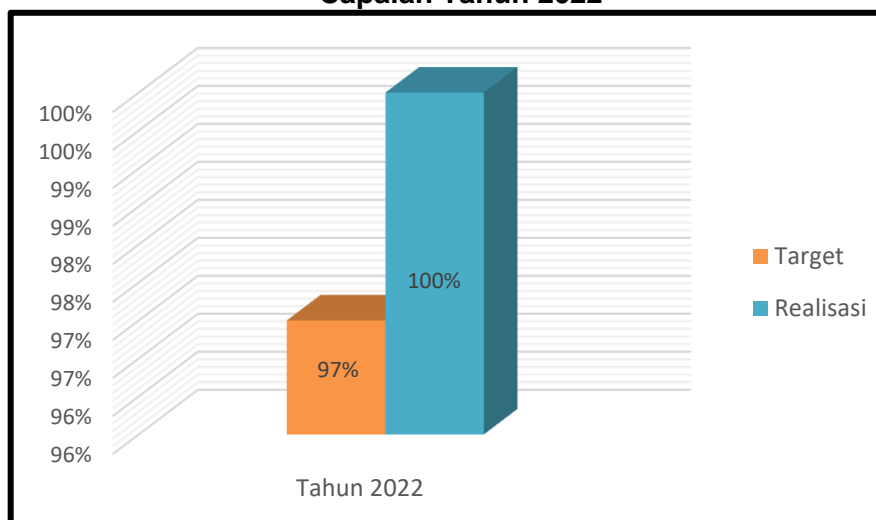
Unsur-unsur pendukung capaian pada indikator ini adalah faktor risiko yang dikendalikan pada pemeriksaan orang sebesar 978 orang, faktor risiko yang dikendalikan pada alat angkut sebesar 14 alat angkut, faktor risiko yang dikendalikan pada lingkungan sebesar 16 tempat, seperti dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 3.6.
Faktor Risiko yang Dikendalikan pada Orang, Alat Angkut, Barang
dan Lingkungan di Wilayah Kerja KKP Kelas II Palembang
Tahun 2022



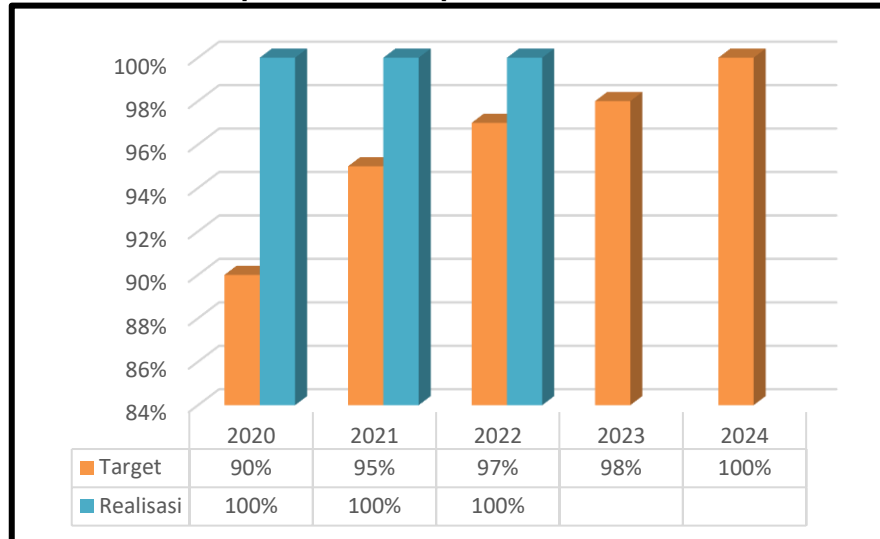
Berdasarkan target yang ditetapkan, realisasi pada indikator ini telah mencapai melebihi target yang ditetapkan pada tahun ini. Dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.7.
Perbandingan Target Indikator 2 Tahun 2022 dengan Realisasi
Capaian Tahun 2022



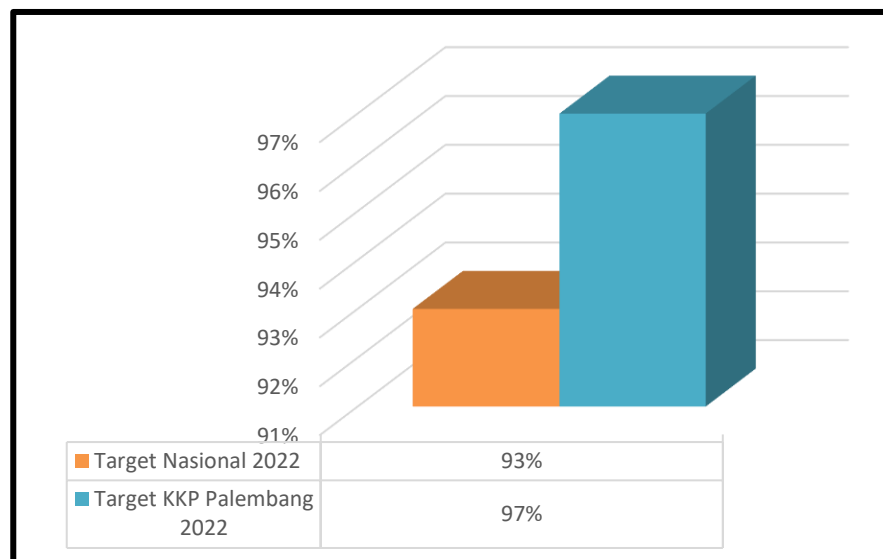
Bila dibandingkan dengan target pada RAK tahun 2020-2024, realisasi yang telah dicapai pada indikator ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 3.8.
Perbandingan Target Indikator 2 pada RAK Tahun 2020-2024 terhadap Realisasi Capaian Tahun 2020-2022



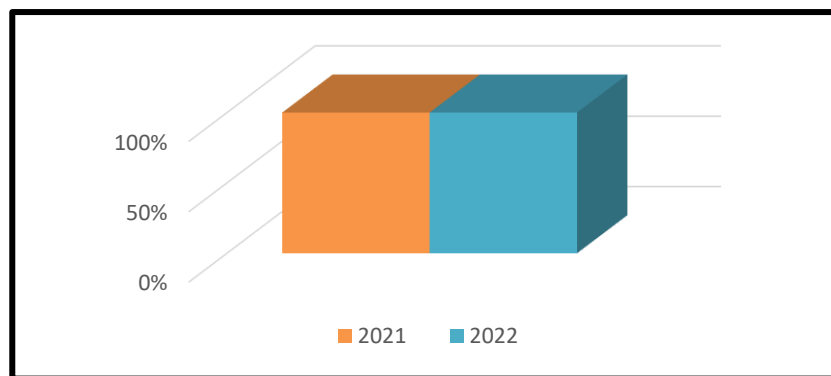
Bila dibandingkan dengan target Nasional pada RAP tahun 2020-2024, dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 3.9.
Perbandingan Target Indikator 2 terhadap Target Nasional Tahun 2022



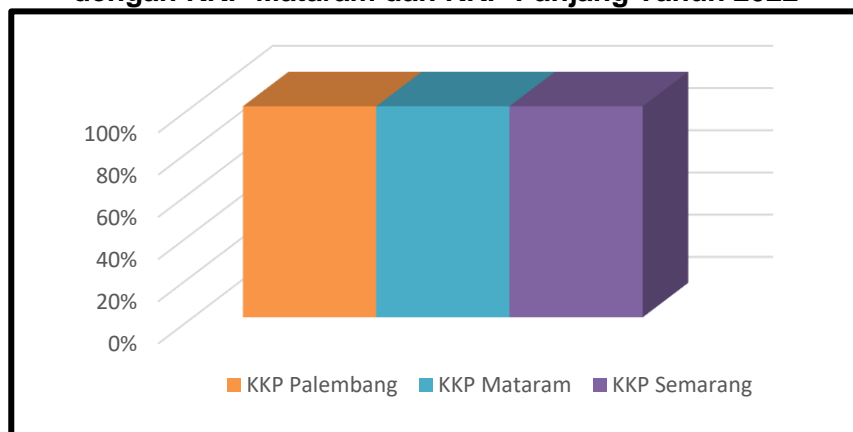
Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk yang Dikendalikan pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan sama-sama mencapai target 100%. Hal ini dikarenakan KKP Kelas II Palembang selalu berusaha memaksimalkan pengendalian faktor risiko yang ditemukan. Dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.9.
Perbandingan Persentase Indikator 2 Tahun 2021 dengan 2022



Pada tahun 2022, bila dibandingkan dengan capaian KKP Mataram, KKP Semarang dan KKP Palembang sama-sama mencapai target 100% dalam pengendalian faktor risiko pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan, seperti dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.10.
Perbandingan Capaian Indikator 2 antara KKP Palembang dengan KKP Mataram dan KKP Panjang Tahun 2022



d. Analisis Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Target Kinerja

Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan di wilayah layanan Kantor Kesehatan Pelabuhan Palembang terlaksana 100%. Keberhasilan pencapaian target indikator ini merupakan hasil dari upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam mencapai target melalui kegiatan:

1. Melakukan pengawasan dan peningkatan kualitas air minum;
2. Melakukan pengawasan sarana pengolahan air bersih dan kualitas air bersih;
3. Melakukan pemantauan kualitas udara dan kebisingan dalam kota;
4. Melakukan pengawasan sampah dan limbah cair;
5. Melakukan pengawasan tpm dan kualitas makanan;
6. Melakukan inspeksi sanitasi tempat-tempat umum;
7. Melakukan pemeriksaan sanitasi lingkungan di wilayah kerja;
8. Melakukan uji resistensi insektisida di wilayah kerja;
9. Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana pengendalian vektor;
10. Melakukan pelayanan kesehatan rujukan dan respon cepat;
11. Melakukan penyelidikan epidemiologi;
12. Melakukan verifikasi rumor;
13. Melaksanakan deteksi dini HIV / AIDS di wilayah kerja;
14. Melakukan pemeriksaan deteksi dini TBC di wilayah kerja;
15. Melakukan pengawasan faktor resiko kesehatan bagi pelaku perjalanan di wilayah kerja;
16. Melakukan pelaksanaan jejaring kerja surveilans epidemiologi lintas sektor melalui surveilans aktif dalam rangka pengamatan epidemiologi;

e. Masalah yang Dihadapi

Meskipun secara target sudah memenuhi 100%, namun masih terdapat permasalahan yaitu kurangnya SDM dalam melaksanakan pengawasan faktor risiko

f. Upaya Pemecahan Masalah

1. Memaksimalkan penempatan pegawai di wilayah kerja,
2. Menggunakan tenaga perbantuan untuk ditempatkan di wilayah kerja baik pelabuhan maupun bandara untuk melakukan pengawasan

g. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan telah mencapai target yaitu 100% dapat dicapai dengan anggaran sebesar 99,54% sehingga pelaksanaan indikator tersebut efisien dengan efisiensi sebesar 51%. Hasil pencapaian indikator ini didukung sumber daya manusia di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang maupun sumber daya peralatan serta anggaran DIPA Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang Tahun Anggaran 2022. Sumber daya tersebut diberdayakan dengan mengedepankan prinsip efektif dan efisien dalam setiap tahapan kegiatan pengendalian faktor risiko penyakit dipintu masuk pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan.

3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pelabuhan/ bandara/PLBDN

Faktor risiko lingkungan merupakan risiko terhadap kesehatan manusia yang disebabkan oleh faktor lingkungan, baik lingkungan fisik, hayati maupun sosial ekonomi budaya.

Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang

dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/ atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.

Pos Lintas Batas Darat Negara adalah pintu masuk orang, barang dan alat angkut melalui darat lintas Negara

a. Definisi Operasional

Status faktor risiko di pelabuhan/ bandara/PLBDN berdasarkan penilaian surveilans, karantina dan risiko lingkungan dalam satu tahun.

b. Cara Perhitungan

Menggunakan parameter perhitungan

1. Persentase Sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam dengan kelengkapan 80%,
2. Persentase bandara/Pelabuhan dengan Indeks pinjal ≤ 1
3. Persentase bandara/Pelabuhan Tidak ditemukan larva anopheles
4. Persentase bandara/Pelabuhan dengan Indeks Populasi kecoa < 2
5. Persentase bandara/Pelabuhan dengan Indeks Populasi lalat < 2
6. Persentase bandara/Pelabuhan dengan HI perimeter = 0
7. Persentase bandara/Pelabuhan dengan HI Buffer < 1
8. Persentase lokus TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan
9. Persentase lokus TPM laik Hygiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan

10. Pemeriksaan lokus kualitas air bersih memenuhi syarat Kesehatan dengan minimal 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali mikrobiologi/bakteriologis

11.

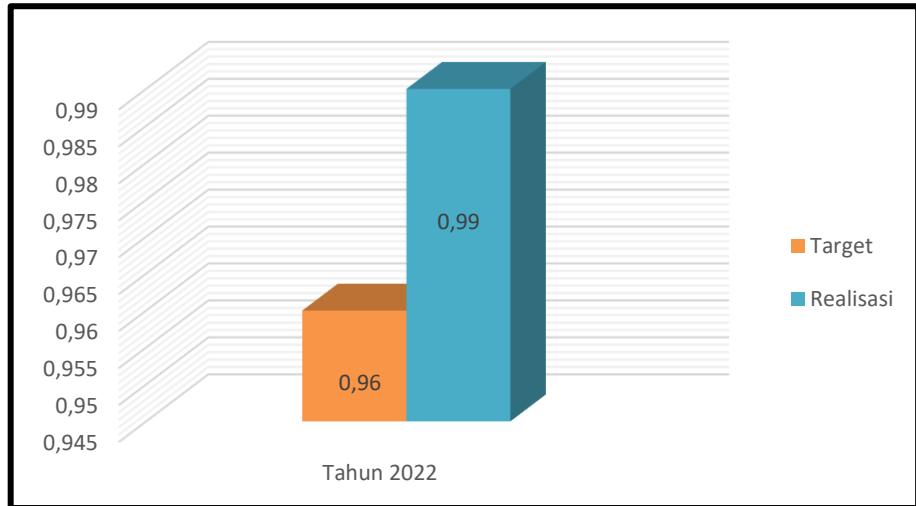
NO	Parameter	Bobot	Baseline	Coverage	Score	Maksimal	Cov Max	Score Max	Minimal	Cov Min	Score Min
1	2	3	4	5=(4/7)*100	6=3*5	7	8	9=3*8	10	11	12=3*11
1	Persentase sinyal SKD KLB dan Bencana yang direpson kurang dari 24 jam dengan kelengkapan 80%	5	100	100	500,00	100	100	500			
2	Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks pinjal ≤ 1	4	100	100	400,00	100	100	400			-
3	Persentase bandara/pelabuhan tidak ditemukan larva anopheles (<1)	3	100	100	300,00	100	100	300			-
4	Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi kecoa <2	4	100	100	400,00	100	100	400			-
5	Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi lalat < 2	4	91,6666667	92	366,67	100	100	400			-
6	Persentase bandara/pelabuhan dengan HI perimeter = 0	5	100	100	500,00	100	100	500			
7	Persentase bandara/pelabuhan dengan HI buffer < 1	5	100	100	500,00	100	100	500			
8	Persentase lokus TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan	4	99,4186047	99	397,67	100	100	400			
9	Persentase lokus TPM laik hygiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan	5	118,661972	119	593,31	100	100	500			
10	Persentase lokus kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan dengan minimal 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali mikrobiologi/bakteriologis	5	79,1666667	79	395,83	100	100	500			
					4.353,48			4.400			0

$$= \frac{\text{Nilai Empiris}}{\text{Nilai Score maksimal} - \text{nilai score minimal}} = \frac{4353,48}{4400 - 0} = 0,99$$

c. Capaian Indikator Kinerja

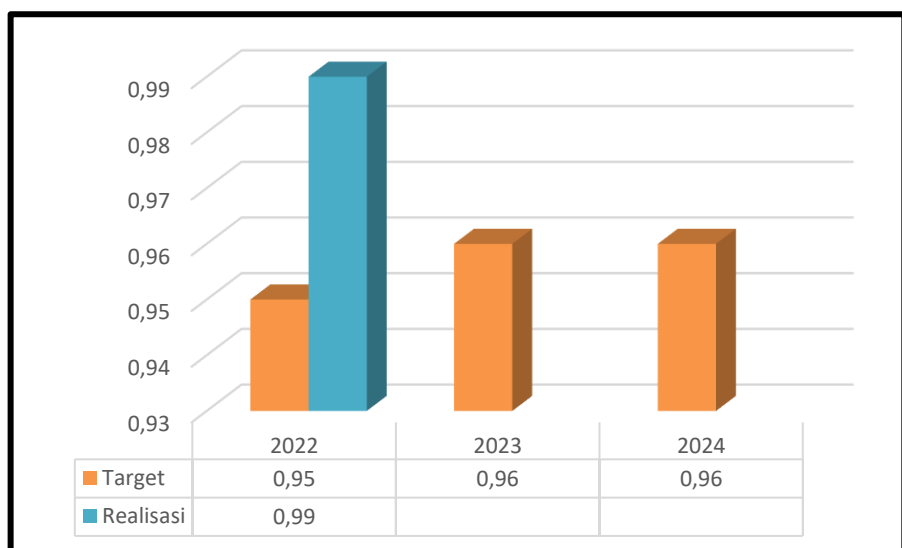
Indeks pengendalian faktor risiko di pelabuhan/ bandara/PLBDN lebih dari target yang ditetapkan pada revisi indikator, dengan pencapaian kinerja pada indikator ini sebesar 0,99 dengan target pada perjanjian kinerja sebesar 0,96. Bila dibandingkan antara pencapaian KKP Palembang dengan target, persentase capaian pada indikator ini sebesar 104,21%. Dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.11.
Perbandingan Target Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pelabuhan/ bandara/PLBDN Tahun 2022 dengan Realisasi Capaian Tahun 2022



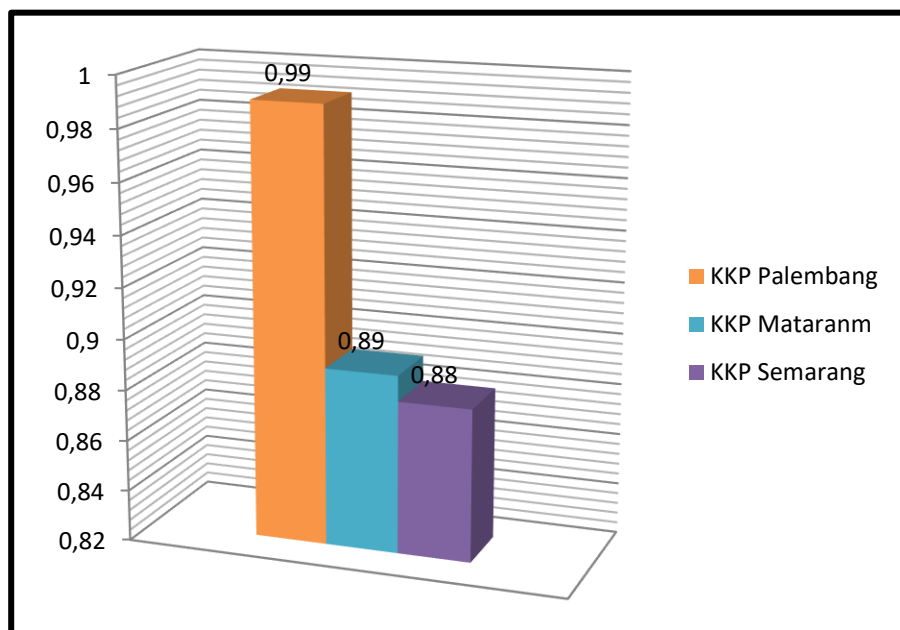
Bila dibandingkan dengan target pada RAK tahun 2020-2024, realisasi yang telah dicapai pada indikator ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 3.12.
Perbandingan Target Indikator 3 pada RAK Tahun 2022-2024 terhadap Realisasi Capaian Tahun 2022



Pada indikator dua ini tidak dapat dilakukan perbandingan capaian dikarenakan pada tahun 2022 ini perhitungan realisasi capaian menggunakan rumus indeks, sebelumnya menggunakan persentase. Capaian KKP Kelas II Palembang tahun ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan KKP kelas II Mataram yang Indeks pengendalian faktor risiko di pelabuhan/ bandara/PLBDN nya sebesar 0,89 dan KKP Semarang yang Indeksnya 0,88. Perbandingannya dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 3.14.
Perbandingan Capaian Kinerja antara KKP Palembang dengan KKP Mataram dan KKP Semarang Tahun 2022



d. Analisis Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Target Kinerja

Keberhasilan pencapaian target indikator ini merupakan hasil dari upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam mencapai target Indeks pengendalian faktor risiko di pelabuhan/ bandara/PLBDN melalui:

1. Pembentukan forum pelabuhan/bandara sehat;
2. Melaksanakan rapat koordinasi persiapan pelaksanaan embarkasi LS/LP;
3. Melaksanakan pelayanan kesehatan haji embarkasi dalam kota;
4. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan penjamah makanan;
5. Melaksanakan pelayanan kesehatan haji debarkasi dalam kota;
6. Melaksanakan rapat evaluasi pelaksanaan embarkasi debarkasi haji;
7. Melaksanakan pemeriksaan sanitasi lingkungan - pra embarkasi;
8. Melaksanakan pemeriksaan sanitasi lingkungan - Lebaran / Nataru;
9. Melaksanakan surveilans dan pengendalian vektor dan BPP – pra embarkasi;
10. Melaksanakan surveilans dan pengendalian vektor dan BPP - Lebaran / Nataru;
11. Melaksanakan layanan kesehatan pada situasi khusus;
12. Melaksanakan layanan pengendalian vektor DBD;
13. Melaksanakan layanan survei vektor PES;
14. Melaksanakan layanan pengendalian vektor diare;
15. Melaksanakan layanan survei vektor DBD;
16. Melaksanakan layanan survei vektor malaria;
17. Melaksanakan layanan survei vektor diare;
18. Melaksanakan layanan pencegahan dan pengendalian penyakit HIV AIDS;
19. Melaksanakan layanan deteksi dini terduga TBC wilayah kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan.

e. Masalah Yang Dihadapi

Meskipun capaian sudah lebih dari target namun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi pada pencapaian target indikator ini yaitu terdapat wilayah kerja yang karakteristiknya merupakan wilayah air payau, sehingga sulit untuk mencapai hasil kualitas air bersih yang maksimal.

f. Upaya Pemecahan Masalah

Memberikan laporan hasil pemeriksaan kualitas air bersih pada pengelola Pelabuhan terkait untuk dapat dilakukan tindak lanjut berupa pengolahan air bersih atau penyediaan air bersih di Pelabuhan.

g. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Capaian Indikator Indeks pengendalian faktor risiko di pelabuhan/ bandara/PLBDN sebesar 95,20%, dengan target pada perjanjian kinerja sebesar 90%. Bila dibandingkan antara pencapaian KKP Palembang dengan target, persentase capaian pada indikator ini sebesar 105,78% dapat dicapai dengan anggaran 99,17% sehingga pelaksanaan indikator ini efisien dengan nilai efisiensi sebesar 52%. Hasil pencapaian indikator ini didukung sumber daya manusia di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang maupun sumber daya peralatan serta anggaran DIPA Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang Tahun Anggaran 2022. Sumber daya tersebut diberdayakan dengan mengedepankan prinsip efektif dan efisien dalam setiap tahapan kegiatan pengendalian faktor risiko di pelabuhan/ bandara/PLBDN.

4. Nilai kinerja anggaran

Evaluasi kinerja anggaran adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas kinerja anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kinerja anggaran.

Kinerja anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran kementerian / lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran. Kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran dari kegiatan atau program dan hasil dari program dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Pada indikator Nilai Kinerja Anggaran terdapat 4 indikator penilaian yaitu:

1. Realisasi Anggaran
2. Konsistensi RPD
3. CRO
4. Efisiensi

a. Definisi Operasional

Capaian keluaran kegiatan diukur dari realisasi Volume Keluaran (RVK) dan realisasi volume keluaran kegiatan (RIKK) dengan menggunakan formula rata geometrik.

b. Cara Perhitungan

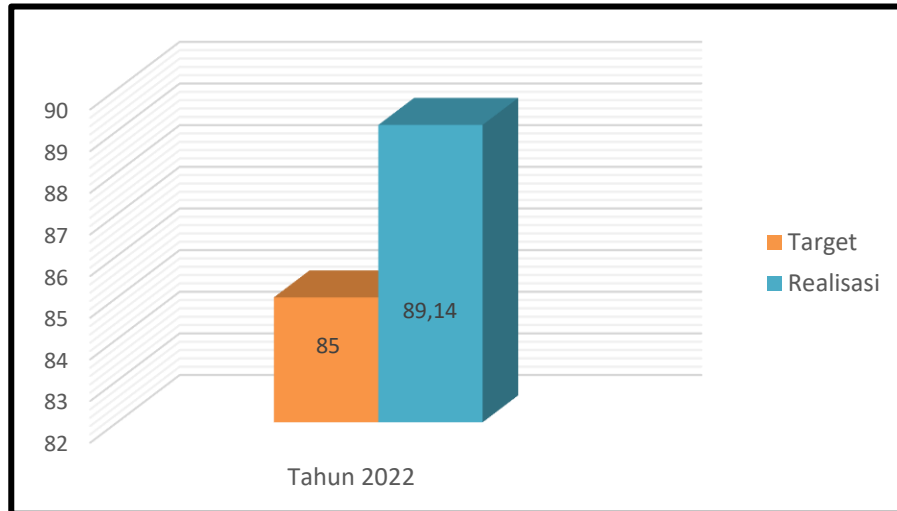
Realisasi volume kegiatan / target volume kegiatan x realisasi indikator kegiatan / target indikator kegiatan.

Dalam pelaksanaan penilaian Indikator Kinerja Anggaran, secara otomatis dilakukan oleh sistem yakni aplikasi e-Monev DJA. Nilai Indikator Kinerja Anggaran KKP Palembang pada dashboard e-monev DJA adalah 84,77.

c. Capaian Indikator Kinerja

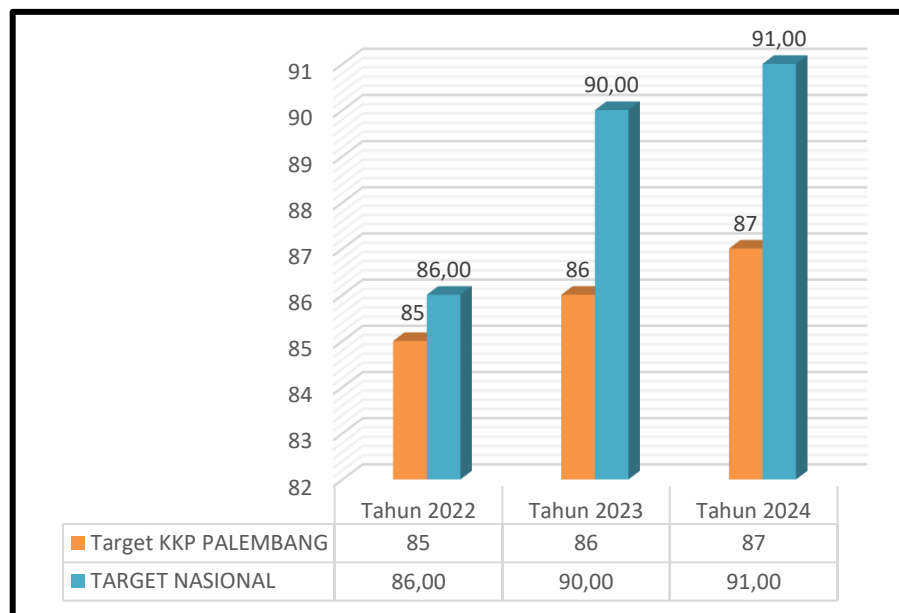
Realisasi nilai kinerja anggaran Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar 89,14 dengan target awal 85. Bila dibandingkan antara kinerja anggaran KKP Kelas II Palembang dengan target pada perjanjian kinerja, didapat persentase sebesar 104,87%. Dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.15.
Perbandingan Target Indikator Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2022 dengan Realisasi Capaian Tahun 2022



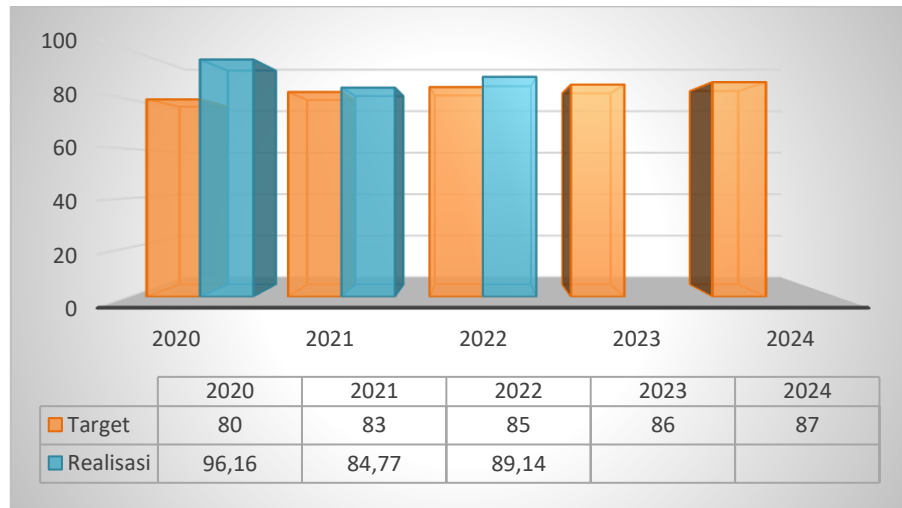
Bila dibandingkan target pada RAK tahun 2020-2024 dengan target nasional 2022-2024 pada indikator ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 3.16.
Perbandingan Target Indikator Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2022 dengan Target Nasional 2022



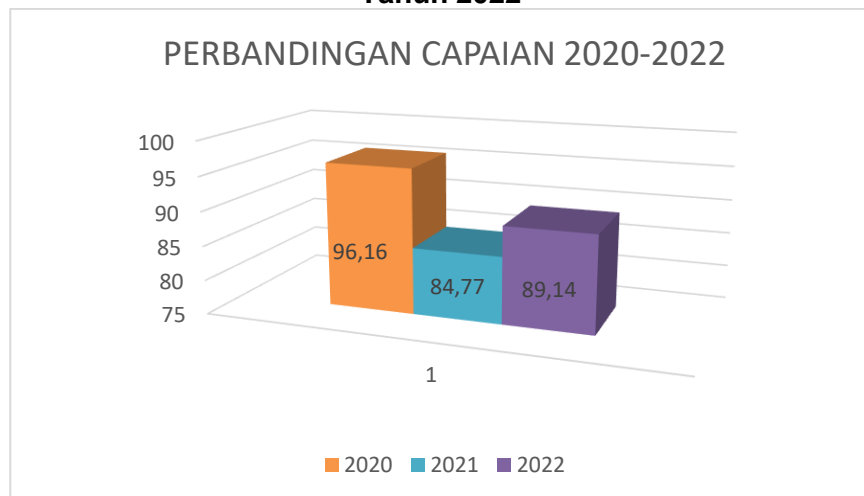
Bila dibandingkan dengan target pada RAK tahun 2020-2024, realisasi yang telah dicapai pada indikator ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 3.17.
Perbandingan Target Indikator 4 pada RAK Tahun 2020-2024 terhadap Realisasi Capaian Tahun 2020-2022



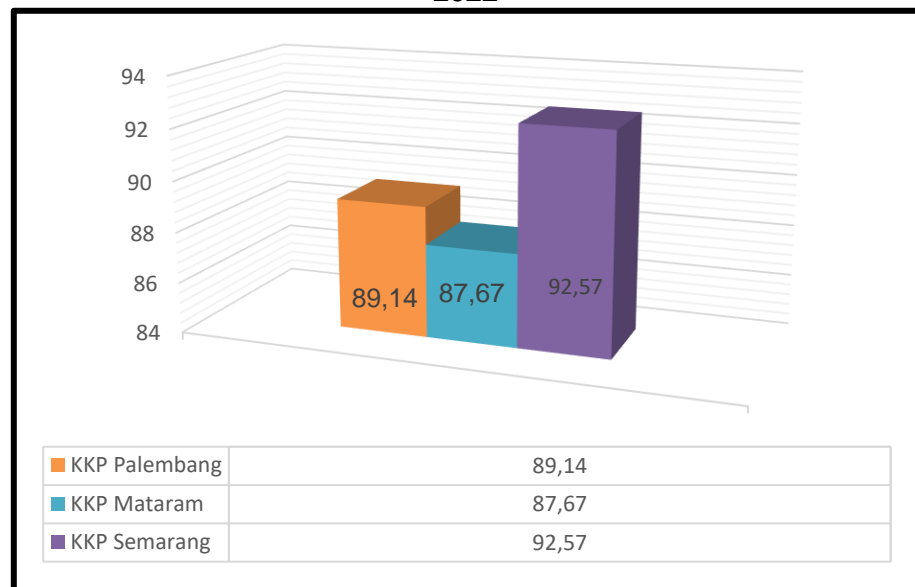
Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Nilai Kinerja Anggaran pada tahun 2022 dengan capaian sebesar 84,77 lebih rendah dibandingkan tahun 2020 dengan capaian 96,16. Dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.18.
Perbandingan Nilai Kinerja Anggaran antara Tahun 2020 dengan Tahun 2022



Bila dibandingkan capaian KKP Kelas II Palembang dengan KKP Kelas II Semarang dan KKP Kelas II Mataram , capaian KKP Kelas II Palembang sebesar 89,14, sedangkan KKP Kelas II Mataram sebesar 87,67 dan KKP Kelas II Semarang sebesar 92,57. Dalam indikator ini, capaian KKP Kelas II Semarang lebih tinggi dibandingkan KKP Kelas II Palembang, namun bila dibandingkan dengan KKP Kelas II Mataram, capaian KKP Palembang lebih tinggi seperti dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 3.19.
Perbandingan Nilai Kinerja Anggaran antara KKP Palembang dengan KKP Mataram dan KKP Semarang Tahun 2022



d. Analisis Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Target Kinerja

Keberhasilan pencapaian target indikator kinerja ini dilakukan dengan menjaga kepatuhan terhadap perencanaan, pelaksanaan tata kelola keuangan yang baik, tidak melakukan revisi berulang kali dan dengan mengupayakan proses penyerapan anggaran serta realisasi output secara maksimal.

e. Masalah yang Dihadapi

Tidak ada kendala yang berarti dalam pencapaian indikator kinerja anggaran ini. Namun begitu tetap perlu dilakukan peningkatan dari waktu ke waktu.

f. Upaya Pemecahan Masalah

KKP Kelas II Palembang selalu berupaya meningkatkan kinerja yang sudah baik dan mengevaluasi secara berkala terhadap pola kerja serta kinerja yang ada melalui rapat evaluasi kinerja setiap bulannya.

g. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Capaian indikator nilai kinerja anggaran tahun 2022 sebesar 89,14, bila dibandingkan antara kinerja anggaran KKP Kelas II Palembang dengan target pada perjanjian kinerja didapat persentase sebesar 104,87% dicapai dengan anggaran 98,36% sehingga pelaksanaan indikator ini efisien dengan efisiensi sebesar 54%. Hal ini karena perencanaan, persiapan sarana dan prasarana merupakan kunci keberhasilan kegiatan. Perencanaan anggaran yang diperlukan bahkan dimulai prosesnya dalam rentang waktu satu tahun sebelumnya. Penunjukan dan penempatan petugas pelaksana sesuai dengan kompetensi dan secara kuantitas dan kualitaspun memadai sehingga capaian dapat melampaui target yang telah ditetapkan.

5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengatur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari tiga aspek:

1. Kualitas Perencanaan Anggaran (20%)
2. Kualitas Pelaksanaan Anggaran (55%)
3. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran (25%)

Dalam penyusunan IKPA terdapat 8 Indikator Kinerja:

1. Revisi DIPA (10%)
2. Deviasi Halaman III DIPA (10%)
3. Data Kontrak (10%)
4. Penyelesaian Tagihan (10%)
5. Pengelolaan UP dan TUP (10%)
6. Dispensasi SPM (5%)
7. Penyerapan Anggaran (20%)
8. Capaian Output (25%)

. Untuk rincian 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Kualitas Perencanaan Anggaran	Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran
1. Revisi DIPA 2. Deviasi Halaman III DIPA	3. Penyerapan Anggaran 4. Belanja Kontraktual 5. Penyelesaian Tagihan 6. Pengelolaan UP dan TUP 7. Dispensasi SPM	8. Capaian Output

a. Definisi Operasional

Indikator untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

b. Cara Perhitungan

Cara penilaian IKPA juga memiliki bobot yang berbeda beda pada masing masing indikator. Perbedaan bobot nilai ini akan dapat mempengaruhi nilai total IKPA yang dapat diterima oleh satuan kerja, sehingga perlu penekanan terhadap indikator yang memiliki bobot nilai yang cukup besar. Namun dengan tetap mempertahankan kinerja

indikator lain dengan baik. Untuk bobot penilaian IKPA dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3.
Bobot Penilaian IKPA

No	Indikator	Bobot (%)
1.	Revisi DIPA	10
2.	Deviasi Halaman III DIPA	10
3.	Penyerapan Anggaran	20
4.	Belanja Kontraktual	10
5.	Penyelesaian Tagihan	10
6.	Pengelolaan UP dan TUP	10
7.	Dispensasi SPM	5
8.	Capaian Output	25

$$\text{Nilai IKPA} = \sum_{n=1}^8 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) : \text{Konversi Bobot}$$

Keterangan :

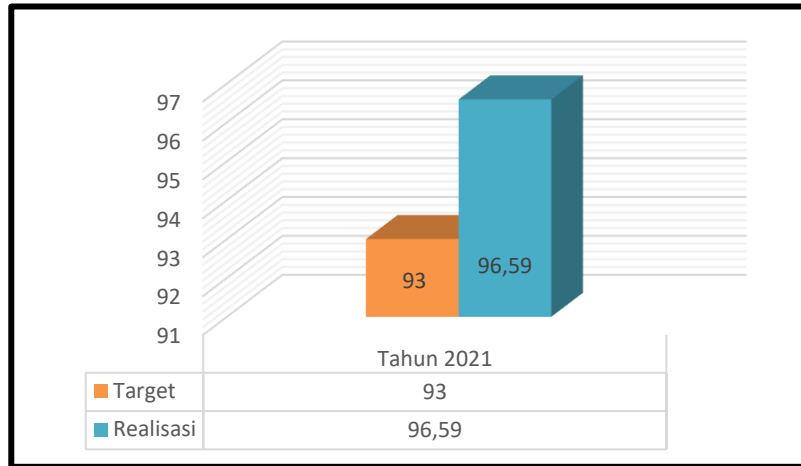
- a. Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Es I/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.
- b. Konversi bobot bernilai di bawah 100% apabila pada Satker/Es I/K/L tidak terdapat data transaksi untuk Satker tertentu.

Dalam pelaksanaan penilaian IKPA, secara otomatis dilakukan oleh sistem yakni aplikasi SPAN. Nilai IKPA KKP Palembang pada aplikasi OMSPAN adalah 96,59.

c. Capaian Indikator Kinerja

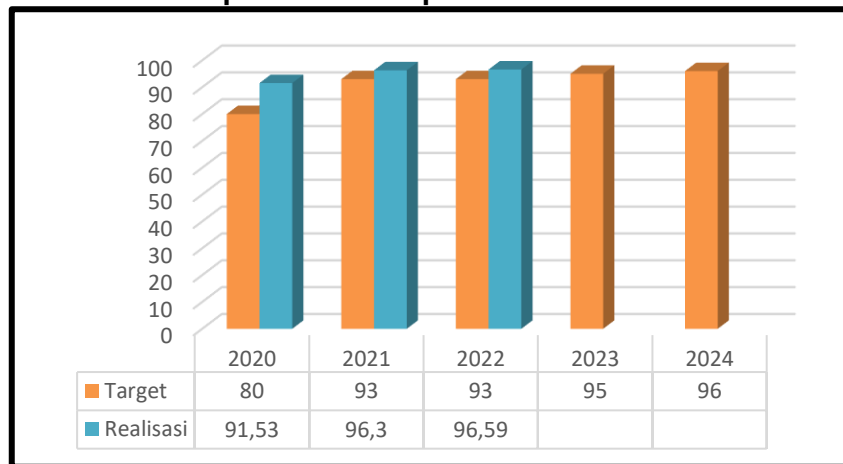
Realisasi nilai kinerja pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar 96,59 dengan target pada awal tahun sebesar 93. Bila dibandingkan antara kinerja anggaran KKP Kelas II Palembang dengan target pada perjanjian kinerja, didapat persentase sebesar 103,86%. Dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.19.
Perbandingan Target Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 dengan Realisasi Capaian Tahun 2022



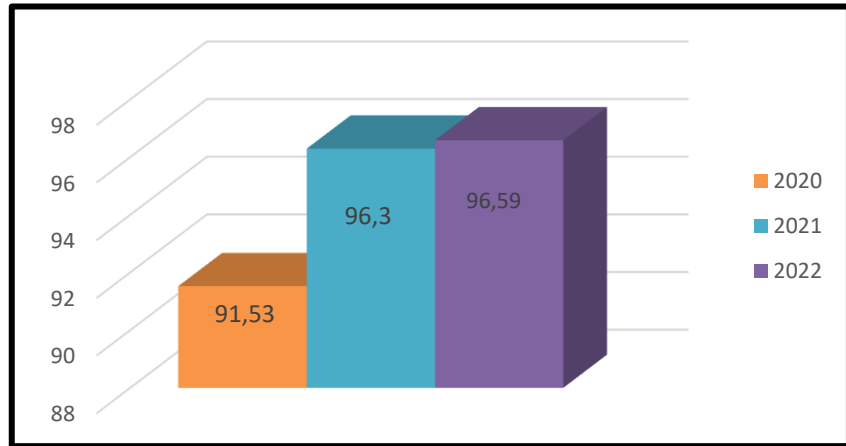
Bila dibandingkan dengan target pada RAK tahun 2020-2024, realisasi yang telah dicapai pada indikator ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 3.20.
Perbandingan Target Indikator 5 pada RAK Tahun 2020-2024 terhadap Realisasi Capaian Tahun 2020-2022



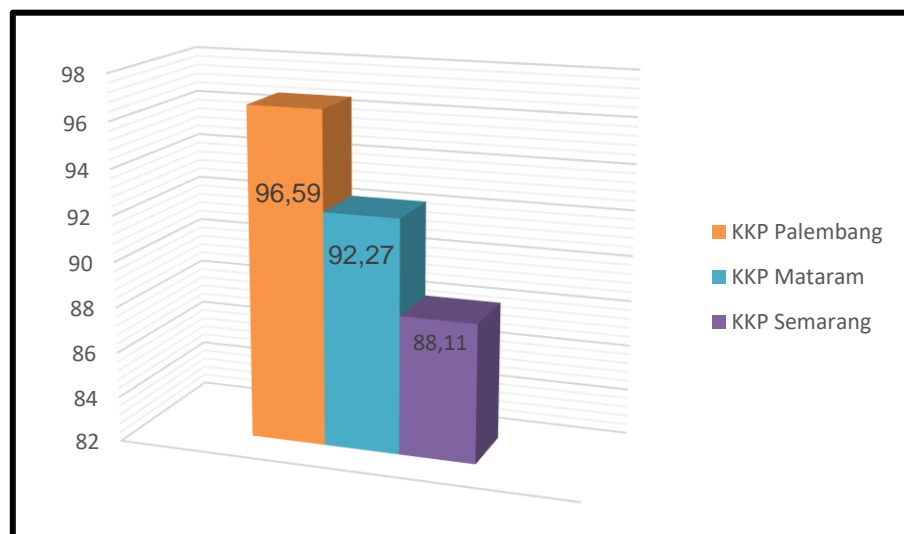
Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada tahun 2022 dengan capaian sebesar 96,59 sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 dengan capaian 96,3. Dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.21.
Perbandingan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022



Bila dibandingkan capaian KKP Kelas II Palembang dengan KKP Kelas II Mataram dan KKP Kelas II Semarang, capaian KKP Kelas II Palembang sebesar 96,5 sedangkan KKP Kelas II Mataram sebesar 92,27 dan KKP Kelas II Semarang 88,11. Dalam indikator ini, capaian KKP Kelas II Palembang lebih tinggi seperti dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 3.22.
Perbandingan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran antara KKP Palembang dengan KKP Mataram dan KKP Semarang Tahun 2022



d. Analisis Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Target Kinerja

Keberhasilan pencapaian target indikator kinerja ini dengan mengupayakan perbaikan kinerja pada setiap indikator IKPA tersebut sesuai dengan acuan pengukuran dan penilaiannya. Upaya-upaya yang telah dilaksanakan meliputi:

1. Perbaikan Perencanaan

Melakukan perencanaan sesuai ketentuan, dilakukan secara berjenjang

2. Perbaikan Pelaksanaan

Melakukan kegiatan sesuai dengan ROK dan RPD yang telah disusun

3. Pemberian reward atau sanksi

Memberikan penghargaan kepada substansi yang serapan anggarannya baik.

e. Masalah yang Dihadapi

Kendala dikarenakan ada ketidaksesuaian antara rencana penarikan dana dengan yang telah direncanakan pada DIPA serta kealfaan dalam proses revisi RPD.

f. Upaya Pemecahan Masalah

Membuat RPD (rencana penarikan dana) yang lebih matang, apabila ada ketidaksesuaian RPD akan segera di revisi.

g. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran tahun 2022 sebesar 96,59 dengan target 93 sehingga pencapaian kinerja pada indikator ini sebesar 103,86% dan dapat dicapai dengan anggaran 93,54% sehingga pelaksanaan indikator ini efisien dengan efisiensi sebesar 66%. Hasil pencapaian indikator didukung sumber daya manusia di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang maupun sumber daya peralatan serta anggaran DIPA Kantor Kesehatan

Pelabuhan Kelas II Palembang Tahun Anggaran 2022. Sumber daya tersebut diberdayakan dengan mengedepankan prinsip efektif dan efisien dalam setiap tahapan kegiatan sehingga realisasi kinerja mencapai target.

6. Kinerja Implementasi WBK Satuan Kerja

a. Definisi Operasional

Perolehan nilai implementasi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Satuan Kerja melalui penilaian mandiri (*self Assesment*) yang dilakukan oleh Satuan Kerja dengan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang berlaku dan kemudian dilakukan evaluasi oleh Unit Pembina Sekretariat Direktorat Jenderal P2P.

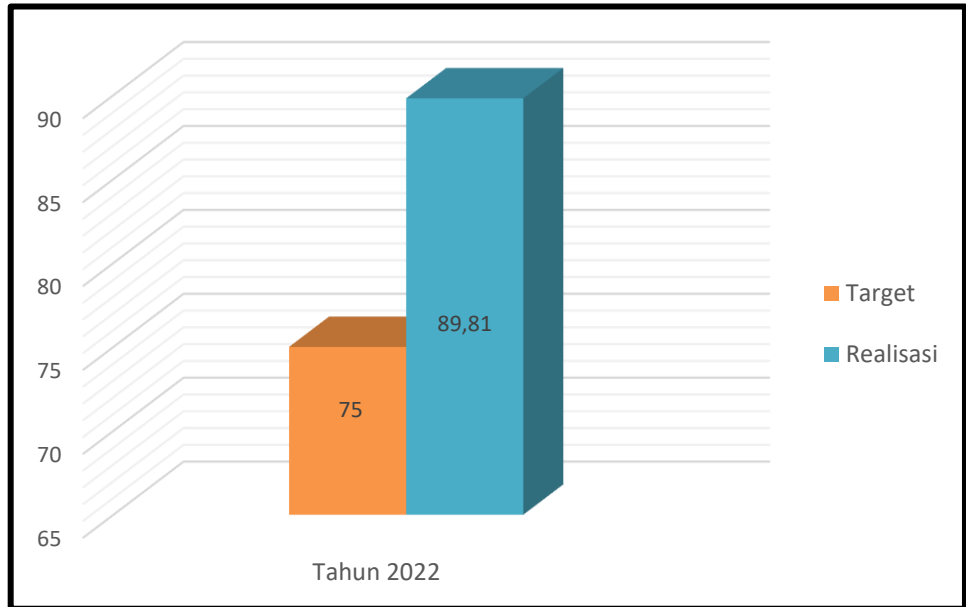
b. Cara Perhitungan

Nilai implementasi WBK Satker dihitung dari akumulasi Nilai Total Pengungkit dan Nilai Total Hasil
= 89,81

c. Capaian indikator Kinerja

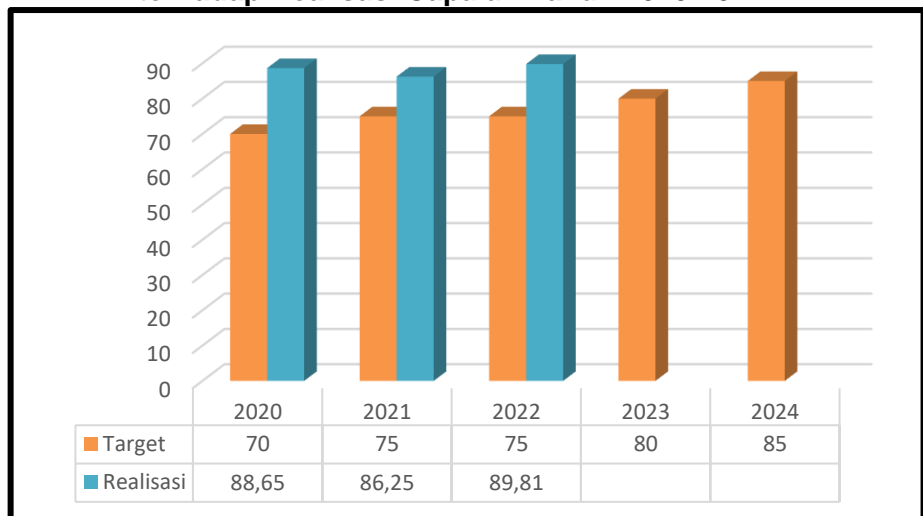
Capaian nilai implementasi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) KKP Palembang Tahun 2021 adalah 89,81 dari target sebesar 75. Bila dibandingkan dengan target pada perjanjian kinerja TA 2022, capaian KKP Palembang sebesar 119,75%. Dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.23.
Perbandingan Target Indikator Kinerja Implementasi WBK
Satuan Kerja Tahun 2022 dengan Realisasi Capaian Tahun 2022



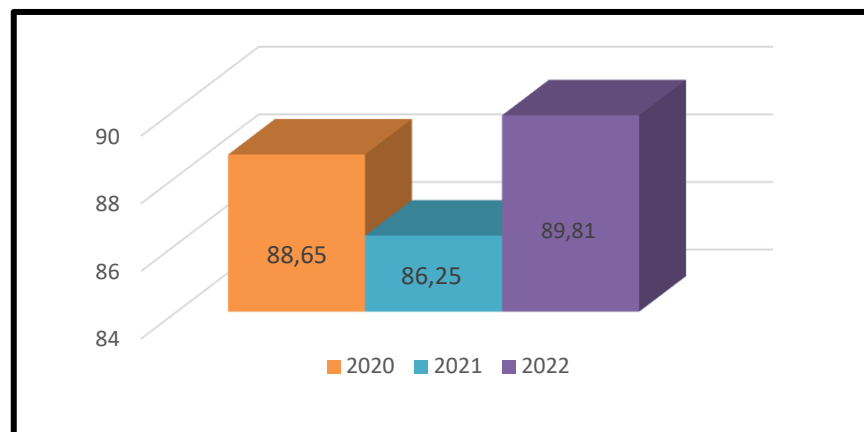
Bila dibandingkan dengan target pada RAK tahun 2020-2024, realisasi yang telah dicapai pada indikator ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 3.24.
Perbandingan Target Indikator 6 pada RAK Tahun 2020-2024
terhadap Realisasi Capaian Tahun 2020-2022



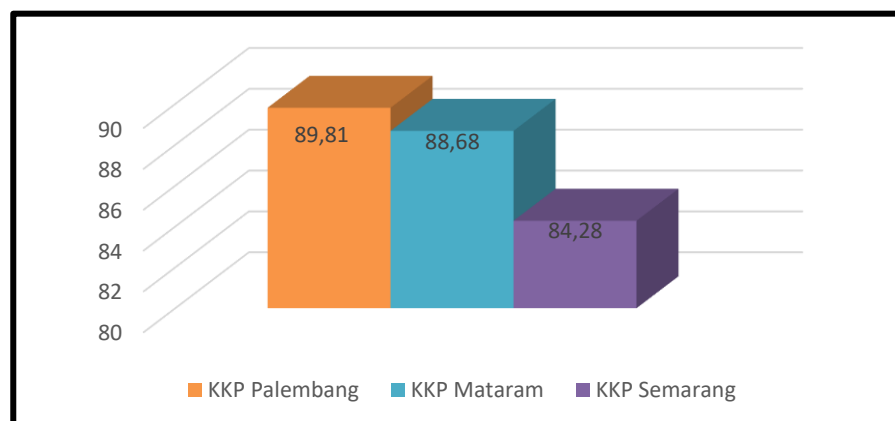
Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Nilai Kinerja Implementasi WBK Satuan Kerja pada tahun 2022 dengan capaian sebesar 89,81 lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 dengan capaian 86,25. Dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.25.
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Implementasi WBK Satuan Kerja Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022



Bila dibandingkan dengan KKP sekelas, nilai implementasi KKP Kelas II Palembang lebih tinggi dibandingkan KKP Mataram yang mendapat nilai 88,68 dan KKP Semarang yang memperoleh nilai 84,28, hal ini dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Gambar 3.26.
Perbandingan Realisasi Nilai Kinerja Implementasi WBK Satuan Kerja KKP Palembang dengan KKP Kelas II Mataram dan KKP Kelas II Semarang Tahun 2022



d. Analisis Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Target Kinerja

KKP Kelas II Palembang mendapatkan nilai sebesar 89,81 berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim Penilai Internal (TPI) yang dilaksanakan pada tanggal 11-13 Oktober 2022. KKP Kelas II Palembang telah ditetapkan sebagai Unit Kerja yang telah memenuhi persyaratan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Tahun 2022 Tingkat Kementerian Kesehatan sesuai SK Menkes Nomor HK.01.07/MENKES/1895/2022. Keberhasilan dalam mencapai target indikator ini merupakan hasil dari upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam mencapai target dengan cara melengkapi semua persyaratan dan dokumen yang diperlukan dalam penilaian WBK.

e. Masalah yang Dihadapi

Tidak ada kendala yang berarti dalam pencapaian indikator kinerja implementasi WBK ini. Namun begitu tetap perlu dilakukan peningkatan dari waktu ke waktu agar bisa meraih penghargaan WBK tingkat lanjut.

f. Upaya Pemecahan Masalah

Adapun upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala tersebut yaitu mengingatkan tim WBK untuk menyiapkan dan melengkapi semua dokumen yang berkaitan dengan penilaian WBK satuan kerja. Melakukan koordinasi melalui rapat secara virtual dengan pegawai yang berada di wilayah kerja / pos kerja.

g. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Capaian kinerja implementasi WBK satuan kerja tahun 2022 sebesar 89,81 dengan persentase capaian sebesar 119,75% dan dapat dicapai dengan anggaran 94,45% sehingga pelaksanaan indikator ini efisien dengan efisiensi sebesar 64%. Hasil pencapaian indikator didukung sumber daya manusia di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang maupun sumber daya peralatan serta anggaran DIPA

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang Tahun Anggaran 2022. Sumber daya tersebut diberdayakan dengan mengedepankan prinsip efektif dan efisien dalam setiap tahapan kegiatan sehingga realisasi kinerja mencapai target.

7. Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL

a. Definisi Operasional

Pengembangan kompetensi bagi ASN yang dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun dan dapat dilakukan pada tingkat instansi dan nasional.

b. Cara Perhitungan

$$= \frac{\text{Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitas sebanyak 20 JPL}}{\text{Jumlah Seluruh ASN}} \times 100\%$$

$$= \frac{71}{78} \times 100\%$$

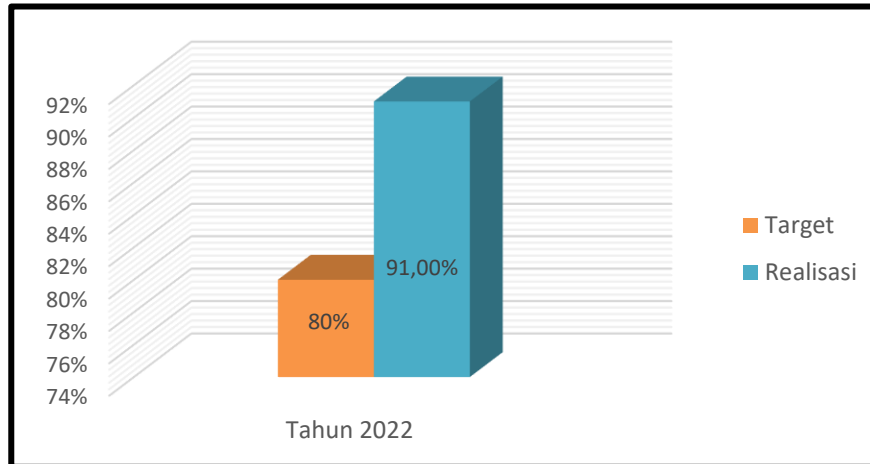
$$= 91\%$$

c. Capaian Indikator Kinerja

Capaian Indikator Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya KKP Kelas II Palembang TA 2022 adalah 91%, dengan target 80%. Bila dibandingkan dengan target pada perjanjian kinerja, maka capaian KKP Kelas II Palembang adalah 113,79%. Target jumlah orang mengikuti pelatihan Tahun 2022 adalah 62 Orang dengan realisasi 71 orang.

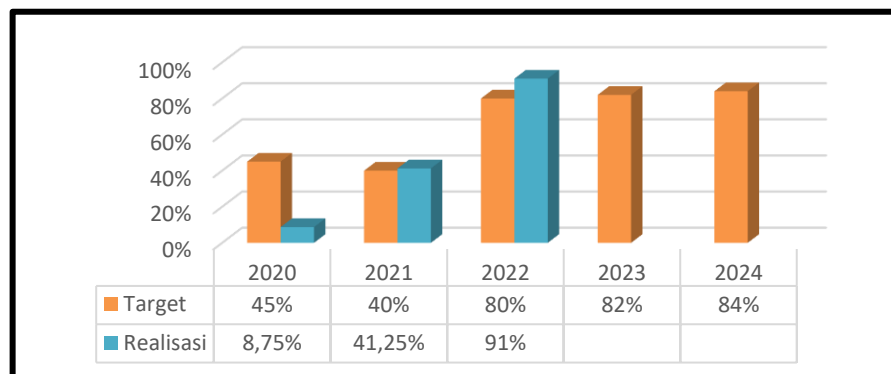
Berdasarkan target yang ditetapkan, realisasi pada indikator ini telah mencapai melebihi target yang ditetapkan pada tahun ini. Dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.27.
Perbandingan Target Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya dengan Realisasi Capaian Tahun 2022



Bila dibandingkan dengan target pada RAK tahun 2020-2024, realisasi yang telah dicapai pada indikator ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

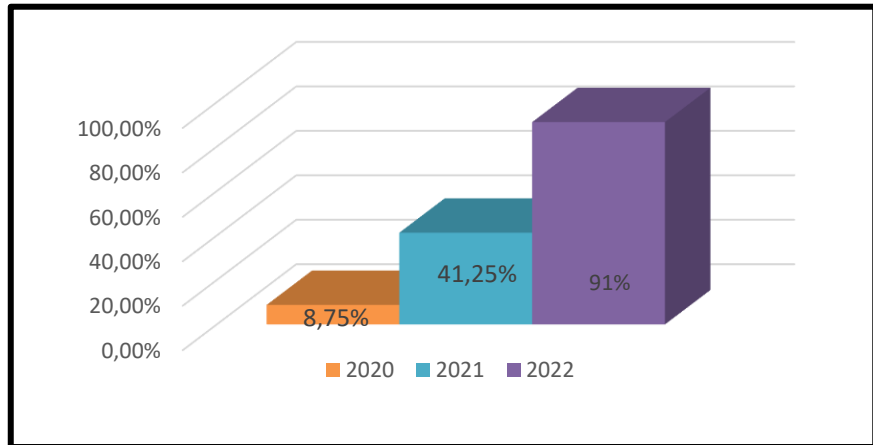
Gambar 3.28.
Perbandingan Target Indikator 7 pada RAK Tahun 2020-2024 terhadap Realisasi Capaian Tahun 2020-2022



Bila dibandingkan dengan tahun 2021, pada tahun ini jumlah peningkatan kapasitas ASN KKP Kelas II Palembang mengalami peningkatan. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya pada tahun 2022 dengan capaian sebesar 91% lebih tinggi dibandingkan

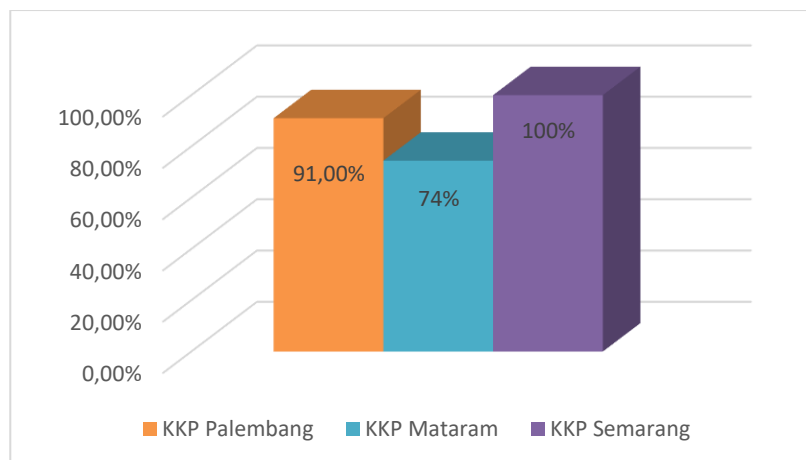
tahun 2020 dengan capaian sebesar 41,25%. Dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.29.
Perbandingan Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022



Dibandingkan dengan KKP sekelas, KKP Kelas II Palembang lebih tinggi capaian persentase peningkatan kapasitas ASN 20 JPL, dimana KKP Kelas II Panjang capaiannya 37% dan bila dibandingkan dengan target dicapai persentase sebesar 82%.

Gambar 3.30.
Perbandingan Realisasi Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya KKP Palembang dengan KKP Kelas II Mataram dan KKP Kelas II Semarang Tahun 2022



d. Analisis Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Target Kinerja
Keberhasilan KKP Palembang dalam indikator Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya melalui berbagai macam pelatihan yang dilakukan secara daring/online.

e. Masalah yang Dihadapi

Meskipun telah melampaui target, namun terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain:

1. Pandemi Covid-19 menyebabkan beberapa pelatihan tidak dapat dilaksanakan dan diikuti oleh pegawai;
2. Alokasi dana satker terbatas untuk pelatihan tertentu.

f. Upaya Pemecahan Masalah

Upaya pemecahan masalah antara lain:

1. Mengikuti pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan penyelenggara secara daring/online;
2. Mendorong pegawai mengikuti webinar, workshop, sosialisasi yang dapat meningkatkan kompetensi secara daring/online;
3. Pegawai dapat memantau jadwal pelatihan dan mendaftar pada Balai Pelatihan terkait;
4. Mengeluarkan nota dinas tentang peningkatan kompetensi ASN agar menjadi perhatian pegawai.

g. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Capaian Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya tahun 2022 sebesar 91%. Pada indikator ini dengan anggaran sebesar 90,87% dengan nilai efisiensi 73% karena penyelenggaraan kegiatan yang banyak dilakukan secara online sehingga ASN memaksimalkan peningkatan kompetensi secara daring.

3.2. Realisasi Belanja Anggaran

3.2.1 Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022. Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp7.599.809.002 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp7.599.809.002 atau mencapai 211,00 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp3.601.850.000 Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp16.303.239.882 atau mencapai 94,17 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp17.312.666.000.

Tabel 3.5.

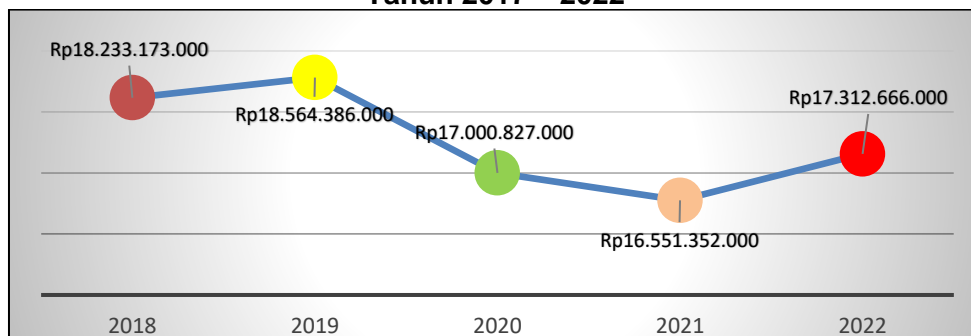
Realisasi Anggaran KKP Kelas II Palembang Tahun 2022

Uraian	2022		%
	Anggaran	Realisasi	
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	3.601.850.000	7.599.809.002	211,00
Jumlah	3.601.850.000	7.599.809.002	211,00

URAIAN	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2022		
	Anggaran	Realisasi	%thdp Angg.
Belanja Pegawai	11.511.860.000	10.622.423.094	92,27
Belanja Barang	5.558.251.000	5.441.034.118	97,89
Belanja Modal	242.555.000	239.782.670	98,86
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	17.312.666.000	16.303.239.882	94,17

Pagu Anggaran KKP Kelas II Palembang selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.31.
Pagu Anggaran KKP Kelas II Palembang
Tahun 2017 – 2022



1) Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.773.353.634 atau mencapai 106,78 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp2.597.212.000. Pendapatan KKP Kelas II Palembang terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp0 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp2.773.353.634. Pendapatan ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya Penurunan realisasi pendapatan disebabkan karena sudah banyaknya klinik yang melayani vaksinasi internasional, yang selama ini menjadi sumber pendapatan PNBPN terbesar. Selain itu pandemi covid-19 yang menyebabkan tidak dapat dilakukannya perjalanan internasional terutama Umroh sehingga permintaan terhadap vaksinasi internasional terutama meningitis menjadi berkurang. dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.6.

Alokasi Penerimaan KKP Kelas II Palembang Tahun 2022

Uraian	2022		%
	Anggaran	Realisasi	
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	3.601.850.000	7.599.809.002	211,00
Jumlah	3.601.850.000	7.599.809.002	211,00

Tabel 3.7.

Realisasi Penerimaan KKP Kelas II Palembang Tahun 2022

URAIAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	%
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	7.599.809.002	2.773.353.634	174,03
Jumlah	7.599.809.002	2.773.353.634	174,03

Realisasi pendapatan PNBPN KKP Kelas II Palembang diperoleh dari pendapatan jasa pelayanan kekarantinaan yang dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.8.**Rincian Realisasi Penerimaan KKP Kelas II Palembang Tahun 2022**

URAIAN	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A. 2021	%
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	31.374.000	-	-
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	313.630	(100,00)
Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	305.020.000	4.140.000	7.267,63
Pendapatan Jasa Karantina Kesehatan	2.722.000.002	2.701.855.004	0,75
Pendapatan Jasa Pemberian Vaksin Kesehatan	4.541.415.000	67.045.000	6.673,68
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-
Pendapatan Anggaran Lain-lain	-	-	-
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	7.599.809.002	2.773.353.634	174,03

2) Belanja

Realisasi Belanja pada TA 2022 adalah sebesar Rp16.303.239.882 atau 94,17 % dari anggaran belanja sebesar Rp.17.312.666.000 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9.**Realisasi Anggaran Belanja KKP Kelas II Palembang Tahun 2022**

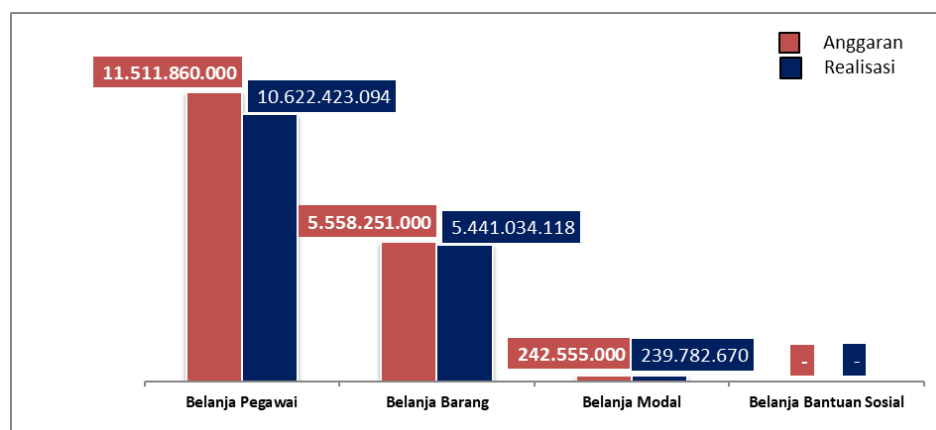
URAIAN	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2022		
	Anggaran	Realisasi	% thdp Angg.
Belanja Pegawai	11.511.860.000	10.622.423.094	92,27
Belanja Barang	5.558.251.000	5.441.034.118	97,89
Belanja Modal	242.555.000	239.782.670	98,86
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	17.312.666.000	16.303.239.882	94,17

Secara komposisi Realisasi Belanja Barang terbesar adalah berupa Belanja Perjalanan Dalam Negeri mencapai Rp1.895.444.391 atau 34,84% dari total Belanja Barang Tahun 2022, jika dibanding dengan Tahun 2021 terdapat

Penurunan sebesar Rp458.776.107 atau turun 19,49 %. Sedangkan realisasi Belanja Barang terkecil berupa Belanja Non Operasional sebesar Rp.400.279.544

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Gambar 3.32.
Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja KKP Kelas II Palembang Tahun Anggaran 2022



Dibandingkan dengan TA 2021, Realisasi Belanja TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 0,03% Kenaikan Realisasi Belanja Tahun berjalan disebabkan karena meningkatnya anggaran penanganan 64 andemic Covid-19, meskipun ada beberapa kegiatan Embarkasi / Debarkasi Haji dan perjalanan dinas tidak bisa dilaksanakan serta harus dilakukan revisi DIPA untuk dialihkan menjadi perjalanan dinas terkait pencegahan dan pengendalian COVID19. Berikut rincian realisasi belanja TA 2022 dan TA 2021.

Tabel 3.10.
Realisasi Anggaran Belanja KKP Kelas II Palembang Tahun 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A. 2021	%
Belanja Pegawai	10.622.423.094	9.910.100.850	7,19
Belanja Barang	5.441.034.118	5.884.810.053	(7,54)
Belanja Modal	239.782.670	502.706.440	(52,30)
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	16.303.239.882	16.297.617.343	0,03

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp10.622.423.094 dan Rp9.910.100.850. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 7,19 % dari TA 2021. Hal ini disebabkan Pada tahun 2022 terdapat penambahan pegawai yang merupakan pegawai pindahan dan pegawai baru.

Realisasi Belanja Barang per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp5.441.034.118 dan Rp 5.884.810.053 Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang TA 2022 mengalami penurunan

sebesar 7,54% dari Realisasi TA 2021, dan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.11.
Realisasi Belanja Barang KKP Kelas II Palembang Tahunan

URAIAN	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A. 2021	%
Belanja Barang Operasional	1.366.055.588	1.536.691.549	(11,10)
Belanja Barang Non Operasional	400.279.544	437.627.279	(8,53)
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	563.070.276	511.147.500	10,16
Belanja Jasa	434.111.161	367.991.608	17,97
Belanja Pemeliharaan	807.504.273	721.202.304	11,97
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.895.444.391	2.354.220.498	(19,49)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	5.466.465.233	5.928.880.738	(7,80)
Pengembalian Belanja	25.431.115	44.070.685	(42,29)
Jumlah Belanja	5.441.034.118	5.884.810.053	(7,54)

3.2.2. Realisasi Klasifikasi Rincian Output dan Rincian Output

Capaian kinerja KKP Kelas II Palembang tahun 2022 berdasarkan Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Nama Rincian Output	Anggaran	
	Alokasi	Realisasi (Kumulatif)
Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah		
Pelayanan Publik kepada Masyarakat	1.117.886.000,00	1.080.232.002,00
Pelayanan kesehatan haji	696.266.000,00	660.806.247,00
Pelayanan kesehatan di pelabuhan/bandara/lintas batas	421.620.000,00	419.425.755,00
Pelayanan Publik lainnya	791.032.000,00	786.601.137,00
Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di pelabuhan penyeberangan	30.000.000,00	30.000.000,00
Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di bandar udara	45.000.000,00	44.895.000,00
Layanan pengendalian faktor risiko penyakit pada situasi khusus	72.750.000,00	72.380.000,00
Layanan pengendalian faktor risiko penyakit DBD	21.220.000,00	21.194.868,00
Layanan survei faktor risiko penyakit pes	126.077.000,00	126.058.135,00
Layanan pengendalian faktor risiko penyakit diare	10.392.000,00	10.388.800,00
Layanan survei faktor risiko penyakit DBD	39.680.000,00	39.679.700,00
Layanan survei faktor risiko penyakit malaria	8.365.000,00	8.364.800,00
Layanan survei faktor risiko penyakit diare	10.880.000,00	10.870.500,00
Layanan survei faktor risiko penyakit HIV AIDS	36.300.000,00	36.243.876,00
Layanan survei faktor risiko penyakit TB	54.660.000,00	52.445.802,00
Layanan pengendalian faktor risiko lingkungan	101.801.000,00	101.209.856,00
layanan pemeriksaan orang, barang, alat angkut	227.642.000,00	226.839.800,00
Layanan Kegawatdaruratan dan rujukan (katagori II)	6.265.000,00	6.030.000,00
Sarana Bidang Kesehatan	406.476.000,00	405.458.276,00
Pengadaan alat dan bahan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk	406.476.000,00	405.458.276,00
Sarana Bidang Kesehatan	406.476.000,00	405.458.276,00
Pengadaan alat dan bahan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk	406.476.000,00	405.458.276,00
Layanan Manajemen SDM Internal		
Layanan Manajemen SDM	136.500.000,00	132.387.884,00
Layanan Manajemen SDM Internal		
Pelatihan kesehatan	128.660.000,00	108.554.399,00
DUKUNGAN MANAJEMEN PELAKSANAAN PROGRAM DI DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT		
Koordinasi		
Koordinasi lintas program lintas sektor evaluasi program	32.838.000,00	32.562.159,00
Layanan Dukungan Manajemen Internal		
Layanan Perkantoran	14.096.454.000,00	13.181.528.290,00
Layanan Umum	71.383.000,00	71.291.150,00
Layanan Hukum	6.636.000,00	6.522.087,00
Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.600.000,00	1.257.000,00
Layanan dan Prasarana Internal		
Layanan Sarana Internal	350.804.000,00	327.268.578,00
Layanan Manajemen Kinerja Internal		
Layanan Perencanaan dan Penganggaran	95.858.000,00	95.589.214,00
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	22.718.000,00	20.986.323,00
Layanan Manajemen Keuangan	53.821.000,00	53.001.383,00

3.2.3. Realisasi Rata-Rata Pencapaian Kinerja Tahun Anggaran 2022

Pencapaian kinerja KKP Kelas II Palembang tahun 2022 sebesar **108,70%**, bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya sedikit lebih tinggi dari **107,44%** pencapaian kinerja pada tahun 2021.

3.3. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Sumber daya sarana dan prasarana Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang untuk menunjang kegiatan operasional terdiri dari aset bergerak dan tidak bergerak dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.12.

Sumber Daya Sarana dan Prasarana KKP Kelas II Palembang TA 2022

No	Nama Aset	Jumlah	Satuan	Nilai	Kondisi
Tanah		4.362	M2	8.958.190.000	
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Dalam Proses Penggolongan	1.146	M2	5.286.697.000	Baik
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	3.216	M2	3.671.493.000	Baik
Gedung dan Bangunan		6	Unit	4.724.951.000	
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	5	Unit	4.045.862.000	Baik
2	Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen	1	Unit	679.089.000	Baik
Peralatan dan Mesin		1.236	Unit	23.482.187.392	
1	Kendaraan Roda 4	12	Unit	3.401.327.900	Baik
2	Kendaraan Roda 2	9	Unit	131.250.000	Baik
3	Peralatan dan Mesin Lainnya	1.215	Unit	19.949.609.492	Baik

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban kinerja dan anggaran yang berdasarkan akuntabilitas yang berorientasi pada pencapaian-pencapaian kinerja. Secara umum dapat disimpulkan bahwa Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang telah dapat merealisasikan program dan kegiatan tahun 2022 untuk mencapai sasaran strategis sebagaimana tercantum dalam Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2020-2024, yaitu meningkatnya pelayanan kekarantina di pelabuhan/ bandara/PLBDN dan wilayah.

Hal ini didukung dengan fakta bahwa kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang pada tahun 2022 telah berhasil merealisasikan kegiatan yang merupakan penjabaran dari program dan sasaran Direktorat Jenderal P2P untuk melakukan Penyelenggaraan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di pelabuhan/ bandara/PLBDN. Secara umum seluruh pelaksanaan kegiatan tahun 2022 mencapai persentase rata-rata sebesar **108,70%**, bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya sedikit lebih tinggi dari **107,44%** pencapaian kinerja pada tahun 2021 pencapaian kinerja pada tahun 2021, Hal ini disebabkan karena pada tahun 2022, pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia belum berakhir. Seluruh indikator kinerja pada tahun 2022 sudah tercapai sesuai target yang ada pada perjanjian kinerja dan melebihi target yang ada pada perjanjian kinerja.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Langkah-langkah dimasa mendatang guna meningkatkan kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang adalah:

1. Meningkatkan kemampuan, kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia dengan mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan-pelatihan yang tersifat teknis maupun pendukung;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan dalam kegiatan kekarantina kesehatan;
3. Meningkatkan komitmen bersama dan bersinergi yang kuat antar segenap pegawai dalam meningkatkan kinerja dan *performa* Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang tahun 2022 sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Penetapan Kinerja yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran tahun 2022. Semoga laporan ini bisa menjadi awal terwujudnya pemerintah Indonesia yang bersih (*good governance*) bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) khususnya di intern Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang. Keberhasilan yang telah dicapai tahun 2022 merupakan titik awal untuk melanjutkan pelaksanaan program dan kegiatan pada periode tahun 2022 dan tahun berikutnya, dan sekaligus menjadi barometer agar kegiatan-kegiatan di masa mendatang dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien.

LAMPIRAN

**KERTAS KERJA PENETAPAN TARGET KINERJA (REVISI INDIKATOR)
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II PALEMBANG
TAHUN 2022-2024**

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	TARGET			ANALISA PENETAPAN TARGET
				2022	2023	2024	
1	Indeks deteksi faktor risiko di pelabuhan/bandara/PLBDN	Kinerja deteksi faktor risiko di pelabuhan/bandara/PLBDN	Perhitungan didapat dari data pengukuran 4 parameter yaitu : 1.Persentase orang yang diperiksa sesuai standar 2.Persentase alat angkut yang diperiksa sesuai standar 3.Persentase barang yang diperiksa sesuai standar 4.Persentase lingkungan yang diperiksa sesuai dengan standar Mengukur kinerja deteksi dini faktor risiko di pintu masuk negara -Range indeks 0-1 -Bobot dihitung berdasarkan metode USG (Urgency, Seriousness, Growth) -Rumus indeks adalah nilai empiris dibagi (nilai score maksimal	0,89	0,90	0,91	Berdasarkan Jumlah rata-rata penafisan orang, sertifikat alat angkut yang dikeluarkan serta pemeriksaan lingkungan dengan mempertimbangkan kenaikan pada tahun sebelumnya sebagai baseline
2	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	Faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan dalam satu tahun	Jumlah faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan dibagi dengan jumlah faktor risiko yang ditemukan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan dikali 100 %	97%	98%	100%	Berdasarkan persentase faktor risiko pada indikator 1 yang dikendalikan dengan melihat tren 3 tahun terakhir
3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN	Pengendalian faktor risiko lingkungan di pelabuhan/bandara/PLBDN berdasarkan penilaian surveilans, karantina dan risiko lingkungan	Mengukur status indeks pengendalian faktor risiko dipintu masuk negara sebagai berikut : -Menghitung persentase faktor risiko di pintu masuk negara dari akumulasi setiap parameter target atau capaian dijumlahkan dan dibagi 10 dikali 100%. -Setelah didapatkan persentase akumulasi semua parameter dimasukkan ke dalam rumus indeks. -Range indeks 0-1 -Bobot dihitung berdasarkan metode USG (Urgency, Seriousness, Growth) -Bobot 5 Mutiak, Bobot 4 Penting, Bobot 4 Penting -Rumus indeks adalah nilai empiris dibagi (nilai score maksimal	0,95	0,96	0,96	Berdasarkan rata-rata jumlah pemeriksaan faktor risiko lingkungan dab mengacu pada indeks risiko rendah

4	Nilai kinerja anggaran	Capaian keluaran kegiatan diukur dari realisasi Volume Keluaran (RVK) dan realisasi volume keluaran kegiatan (RIKK) dengan menggunakan formula rata geometrik	Realisasi volume kegiatan / target volume kegiatan x realisasi indikator kegiatan / target indikator kegiatan	85	86	87	Berdasarkan rata-rata nilai kinerja anggaran pada tahun sebelumnya
5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Indikator untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.	1. Penyerapan Anggaran dengan bobot penilaian 15% 2. Data Kontrak dengan bobot penilaian 15% 3. Penyelesaian Tagihan dengan bobot penilaian 12% 4. Konfirmasi Capaian Output, bobot penilaian 10% 5. Pengelolaan UP dan TUP dengan bobot penilaian 8% 6. Revisi DIPA dengan bobot penilaian 5% 7. Deviasi halaman III DIPA dengan bobot penilaian 5% 8. LPJ Bendahara dengan bobot penilaian 5% 9. Renkas dengan bobot penilaian 5% 10. Kesalahan SPM dengan bobot penilaian 5% 11. Retur SP2D dengan bobot penilaian 5% 12. Pagu Minus dengan bobot penilaian 5% 13. Dispensasi dengan bobot 5%	93	95	96	Berdasarkan rata-rata persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan pada tahun sebelumnya
6	Kinerja implementasi WBK satker	Perolehan nilai implementasi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Satuan Kerja melalui penilaian mandiri (self Assessment) yang dilakukan oleh Satuan Kerja dengan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang berlaku dan kemudian dilakukan evaluasi oleh Unit Pembina Sekretariat Direktorat Jenderal P2P.	Nilai implementasi WBK Satker dihitung dari akumulasi Nilai Total Pengungkit dan Nilai Total Hasil	75	80	85	Berdasarkan nilai tahun sebelumnya dengan memperkirakan kenaikan lebih kurang 10%

7	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	Pengembangan kompetensi bagi ASN yang dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun dan dapat dilakukan pada tingkat instansi dan nasional	Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitas sebanyak 20 JPL dibagi jumlah seluruh ASN dikali 100%	80%	82,00%	84%	Berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan untuk pelatihan pegawai
---	--	---	--	-----	--------	-----	--

Kepala

Emmiya Rosa, SKM, MKM
NIP.197305251997032001

KERTAS KERJA PENETAPAN CAPAIAN INDIKATOR 1 TAHUN 2022

Indeks Deteksi Faktor Risiko di pintu masuk negara

Baseline	target	capaian	%
Jumlah Pemeriksaan Orang (rekap laporan harian, data poliklinik, ICV, pemeriksaan HIV/TB/Malaria) ==> dihitung kumulatif Jan-Desember	847.932	2.739.729	323%
Rekap laporan harian	729.183	2.349.400	322%
Data poliklinik	15	15	100%
Pemeriksaan kesehatan penjamah makanan untuk pekerja bandara/pelabuhan	45	68	151%
Pemeriksaan crew/ABK (termasuk ICV Crew)	107.889	373.936	347%
Pemeriksaan HIV	600	821	0%
Pemeriksaan TB	600	586	98%
Pemeriksaan Malaria	-	-	0%
Vaksinasi	9.600	14.903	155%
Jumlah Pemeriksaan Alat Angkut (COP, PHQC, Gendec)	10.439	29.950	287%
COP	6.493	12.029	185%
PHQC	3.905	17.878	458%
Gendec	41	43	105%
Jumlah Pemeriksaan Barang (jenazah)	40	69	173%
Jumlah Pemeriksaan Lingkungan (TPP, air, ISPAP, TTU, vektor)	1.232	1.265	90%
TPP	284	319	112%
ISPAB	96	96	100%
Form Pemeriksaan (Lokus)	96	96	100%
TTU	516	514	100%
Vektor	240	240	100%

Bobot 5 Mutlak

Bobot 4 Penting

Bobot 3 Perlu

Berdasarkan USG (Urgency, Seriousness, Growth)

No	Parameter	Bobot	Baseline	Coverage	Score	Maksimal	Cov Max	Score Max	Minimal	Score Min
1	2	3	4	5= (4/7)*100	6=3*5	7	8	9=3*8	10	11=3*10
1	Persentase orang yang diperiksa sesuai standar	5	120	120,0	600,00	100	120	600	0	
2	Persentase alat angkut yang diperiksa sesuai standar	5	120	120,0	600,00	100	120	600	0	
3	Persentase barang yang diperiksa sesuai standar	3	120	120,0	360,00	100	120	360	0	
4	Persentase lingkungan yang diperiksa sesuai standar	5	102,67	102,7	513,35	100	120	600	0	
TOTAL					2.073,35			2.160,00		0

Rumus index adalah nilai empiris dibagi (nilai score maksimal dikurang score minimal)

0,9598843

Target 0,89 realisasi 0,959884259 % kinerja 108%

KERTAS KERJA PENETAPAN CAPAIAN INDIKATOR 2 TAHUN 2022

Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan

Parameter Perhitungan

Pemeriksaan	Jumlah FR yang ditemukan	Jumlah FR dikendalikan	Persentase FR yang dikendalikan
1	3	4	5
Pemeriksaan orang	978	978	100,00%
Pemeriksaan alat angkut	14	14	100,00%
Pemeriksaan barang	-	-	-
Pemeriksaan Lingkungan	16	16	100,00%
Total	1.008	1.008	100,00%

KERTAS KERJA PENETAPAN CAPAIAN INDIKATOR 3 TAHUN 2022

Indeks Pengendalian di pintu masuk negara

Parameter	Baseline
Persentase sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspn kurang dari 24 jam dengan kelengkapan 80%	100%
Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks pinjals 1	100%
Persentase bandara/pelabuhan tidak ditemukan larva anopheles (<1)	100%
Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi kecoa <2	100%
Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi lalat < 92%	92%
Persentase bandara/pelabuhan dengan HI perimeter = 0	100%
Persentase bandara/pelabuhan dengan HI buffer < 1	100%
Persentase lokus TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan	99%
Persentase lokus TPM laik hygiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan	119%
Persentase lokus kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan dengan minimal 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali mikrobiologi/bakteriologis	79%

Bobot 5 Mutlak
 Bobot 4 Penting
 Bobot 3 Perlu
 Berdasarkan USG (Urgency, Seriousness, Growth)

Akumulasi target	capaian
26	26
96	96
36	36
48	48
48	44
48	48
48	48
516	513
284	337
96	76

NO	Parameter	Bobot	Baseline	Coverage	Score	Maksimal	Cov Max	Score Max	Minimal	Cov Min	Score Min	
1	2	3	4	5= (4/7)*100	6=3*5	7	8	9=3*8	10	11	12=3*11	
1	Persentase sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspn kurang dari 24 jam dengan kelengkapan 80%	5	100	100	500,00	100	100	500				
2	Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks pinjals 1	4	100	100	400,00	100	100	400			-	
3	Persentase bandara/pelabuhan tidak ditemukan larva anopheles (<1)	3	100	100	300,00	100	100	300			-	
4	Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi kecoa <2	4	100	100	400,00	100	100	400			-	
5	Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi lalat <	4	91,66666667	92	366,67	100	100	400			-	
6	Persentase bandara/pelabuhan dengan HI perimeter = 0	5	100	100	500,00	100	100	500				
7	Persentase bandara/pelabuhan dengan HI buffer < 1	5	100	100	500,00	100	100	500				
8	Persentase lokus TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan	4	99,41866047	99	397,67	100	100	400				
9	Persentase lokus TPM laik hygiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan	5	118,661972	119	593,31	100	100	500				
10	Persentase lokus kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan dengan minimal 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali mikrobiologi/bakteriologis	5	79,16666667	79	395,83	100	100	500				
									4.353,48			0
									4.400			

Rumus index adalah nilai empiris dibagi (nilai score maksimal dikurang score minimal)

$$((6/(9+11))-0)$$

0,989428245

Tahun 2022: 0,95

Tahun 2023: 0,96

Tahun 2024: 0,96

KERTAS KERJA PENETAPAN CAPAIAN INDIKATOR 3 TAHUN 2022

Nilai kinerja anggaran

Tahun	Nilai Kinerja	Penyerapan Anggaran	Konsistensi	CRO	Efisiensi
2019	92,06	89,30	98,88	99,99	10,64
2020	86,88	92,63	81,62	99,96	7,35
2021	84,77	98,47	89,70	100,00	1,53
2022	89,14	94,17	99,09	100,00	5,83

KERTAS KERJA PENETAPAN CAPAIAN INDIKATOR 4 TAHUN 2022
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Tahun	IKPA	Revisi DIPA	Deviasi Halaman III	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output
2019	95,10	100,00	65,92	100,00	100,00	91,67	89,00	100,00	
2020	91,53	100,00	78,00	99,05	100,00	100,00	87,00	0,00	100,00
2021	96,30	100,00	78,24	100,00	89,00	100,00	93,00	100,00	100,00

KERTAS KERJA PENETAPAN CAPAIAN INDIKATOR 6 TAHUN 2022
Kinerja implementasi WBK satker

Nilai minimum WBK adalah 75 (bagi satker yang nilai dibawah 75)

Tahun	Nilai WBK	Komponen Pengungkit	Komponen Hasil	Lain-Lain
2020	88,65			
2021	86,25	49,24	37,01	
2022	89,81			

KERTAS KERJA PENETAPAN CAPAIAN INDIKATOR 6 TAHUN 2022
Kinerja implementasi WBK satker

Nilai minimum WBK adalah 75 (bagi satker yang nilai dibawah 75)

Tahun	Nilai WBK	Komponen Pengungkit	Komponen Hasil	Lain-Lain
2020	88,65			
2021	86,25	49,24	37,01	
2022	89,81			

JUMLAH JAM PELAJARAN TAHUN 2022

NO	NAMA PEGAWAI	NIP	PENDIDIKAN		PELATIHAN KLASIKAL										Jumlah JPL SE TAHUN	STATUS (SUDAH BELUM TERPE-NUHI)													
			TUGAS BELAJAR BELAJAR	ZIN BELAJAR	PELATIHAN STRUKTUR (KUALIFIKASI)	PELATIHAN MANAJERIAL	PELATIHAN TENNIS	PELATIHAN FUNGSIONAL	PELATIHAN SOSIO KULTURAL	SEMINAR/ KONSEN/ SARASEH AN/ SARASEH SASI/ SARASEH AN/	PELATIHAN KURSUS	PELATIHAN PENATAN TERNS	BIMBINGAN TENNIS	SOSIALISASI			COACHING	MENTORING	E-LEARNING	PELATIHAN JARAK JAUH	DATABASE RING	PEMBERIAN ALAM TERBUKA (OUT-MARKING) BOND)	PERTUKARAN ANTARA PNS DENGAN PEKAWAI SWASTA	KOMUNITAS BELAJAR	BIMBINGAN DI TEMPAT KERJA	MAGANG/ PRAKTEK KERJA			
72	Septi Rustina	199309132015032001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	SUDAH	
73	Dwi Wira Dharma Yani	198004252014122004	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	SUDAH
74	Yasmi Lestari	199201122015032002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	SUDAH
75	Fri Oktania Yulandari	19880122015032001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	SUDAH
76	Puspita Rini Pakpahan	198506042009032007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	BELUM
77	Musyarifah, A.Md	199708072020122007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	SUDAH
78	Ning Ayu Mulia, Anndi Ki	199411122020122004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	SUDAH
0 TOTAL			40	220	923	29	447	240	0	2430	158	0	12	200	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4777	71

PERSENTASE : 91.0256 %